PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAKU TRANSAKSI ONLINE UMKM DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

TESIS

Diajukan oleh

Eko Lasmono

19919010

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAKU TRANSAKSI ONLINE UMKM DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Akuntansi

TESIS

Diajukan oleh

Eko Lasmono

19919010

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 September 2021

Peneliti



Eko Lasmono

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Dekar Urumsah,S.Si.,M.Com.,Ph.D.,CFrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

EKO LASMONO
No. Mhs. : 19919010
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA PARA PELAKU TRANSAKSI ONLINE UMKM DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Drs. Dekar Urumsah,S.Si.,M.Com.,Ph.D.,CFrA.	Dr. Kumala Hadi, M.S., Ak.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Pengaruh Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Transaksi Online UMKM dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi**" Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terselesainya penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitan maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam

Indonesia dan dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyusunan tesis ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan karyawati di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Segenap keluarga besar peneliti, khususnya kedua orang tua peneliti, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi demi untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 19 yang telah saling mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran, motivasi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
8. Kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan demi terselesainya penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 September 2021

Peneliti



Eko Lasmono

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak transaksi online pada UMKM di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung sebanyak 159 responden. Metode pengambilan data dengan *non probability* sampling dengan menggunakan prosedur *convianience sampling* untuk penyebarannya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengujian statistik berupa *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan *software* smartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menujukan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak . Sedangkan variabel moderasi insentif pajak atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci :Kebijakan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kepatuhan pajak, dan insentif pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the factors that influence individual tax compliance in paying online transaction taxes on UMKM. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to individual taxpayers who pay online transaction taxes on UMKM in the Yogyakarta, Central Java and Lampung areas as many as 159 respondents. The data collection method is non-probability sampling using a convenience sampling procedure for its distribution. The analysis used in this study is statistical testing in the form of Structural Equation Modeling (SEM) using smartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have a significant effect on tax compliance and tax policy has no significant effect on tax compliance. While the moderating variables of tax incentives on the role of tax policy, tax knowledge, and tax sanctions on tax compliance have no significant effect.

***Keywords**: Tax policy, tax knowledge, tax sanctions, tax compliance, and tax incentives*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
BERITA ACARA UJIAN TESIS ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 8
1.5. Sistematika Penulisan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
2.1. Teori Atribusi 11
2.1.1. Keterkaitan Teori Atribusi 12
2.2. Pajak 13
2.2.1. Pengertian Pajak 13
2.2.2. Fungsi Pajak 14
2.2.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak 15
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak 16
2.2.5. Penggolongan Pajak 17

2.3. Bisnis Online 17
2.3.1. Pajak Bisnis Online pada UMKM 19
2.3.1.1. Pajak Penghasilan 19
2.3.1.2. Pajak Pertambahan Nilai 21
2.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak 23
2.4.1. Kebijakan Pajak 23
2.4.2. Pengetahuan Pajak 25
2.4.3. Sanksi Pajak 26
2.4.4. Kepatuhan Pajak 28
2.4.5. Insentif Pajak 29
2.5. Penelitian Terdahulu 31
2.6. Pengembangan Hipotesis Penelitian 39
2.6.1. Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak 39
2.6.2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak 40
2.6.3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak 42
2.6.4. Pengaruh moderasi insentif pajak atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak 43
2.7. Kerangka Penelitian 45
BAB III METODE PENELITIAN 47
3.1. Metodologi Penelitian 47
3.2. Populasi dan Sampel 47
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 48
3.4. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 49

3.4.1. Kebijakan Pajak 50
3.4.2. Pengetahuan Pajak 51
3.4.3. Sanksi Pajak 52
3.4.4. Kepatuhan Pajak 53
3.4.5. Insentif Pajak 54
3.5. Teknik Analisis Data 55
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 55
3.5.2. Analisis *Inferensial* 56
2.5.2.2. Uji Validitas 57
2.5.2.3. Uji Reliabilitas 58
3.5.3. Metode *Partial Least Square* (PLS) 58
3.5.3.1. Langkah – Langkah Metode *Partial Least Square* (PLS) 59
3.5.3.2. *Path Coefficient* 62
3.5.3.3. Koefisien Determinasi (R^2) 62
3.5.3.4. Uji *Goodnes of Fit* (GoF) 63
3.5.4.Uji Hipotesis 63
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 65
4.1. Hasil Pengumpulan Data 65
4.2. Deskripsi Data Responden 66
4.2.1. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin 66
4.2.2. Deskripsi Responden Menurut Kelompok Usia 67
4.2.3. Deskripsi Responden Menurut Pendidikan Terakhir 67
4.2.4. Deskripsi Responden Menurut Jenis Usaha 68

4.2.5. Deskripsi Responden Menurut Usia Usaha 69
4.2.6. Deskripsi Responden Menurut Pendapatan Usaha 70
4.2.7. Deskripsi Responden Menurut Lokasi Usaha 71
4.3. Analisis *Inferensial* 72
4.3.1. Merancang Model Struktural Variabel Konstruk 72
4.3.2. Analisa Model Pengukuran (*Outer Model*) 72
4.3.2.1. Uji Validitas 73
4.3.2.2. Uji Reliabilitas dengan *Composite Reliability* 79
4.3.3. Analisa Model Struktural (*Inner Model*) 80
4.3.3.1. Koefisien Determinasi (R^2) 80
4.3.3.2. Uji *Goodnes of Fit* (GoF) 80
4.3.4. Analisis Jalur 81
4.3.5. Pengujian Hipotesis 82
4.3.5.1. Tahap Pertama 84
4.3.5.2. Tahap Kedua 85
4.3.6. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 87
4.3.6.1.Kebijakan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak 87
4.3.6.2.Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak 89
4.3.6.3.Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak 92
4.3.6.4.Insentif Pajak Berpengaruh atas, Peranan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak 93

4.3.6.5.Insentif Pajak Berpengaruh atas, Peranan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak..... 95
4.3.6.6.Insentif Pajak Berpengaruh atas, Peranan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak..... 97
BAB V PENUTUP 99
5.1. Kesimpulan 99
5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian 100
5.3. Keterbatasan Penelitian 101
5.4. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN - LAMPIRAN 108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Rasio Pajak di Negara ASEAN 4

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 32

Tabel 3.1. Indikator Kebijakan Pajak 51

Tabel 3.2. Indikator Pengetahuan Pajak 52

Tabel 3.3. Indikator Sanksi Pajak 53

Tabel 3.4. Indikator Kepatuhan Pajak 54

Tabel 3.5. Indikator Insentif Pajak 55

Tabel 3.6. Kriteria Penilaian *Partial Least Square* (PLS) 62

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner 65

Tabel 4.2. Komposisi Responden Menurut Jenis Kelamin 66

Tabel 4.3. Komposisi Responden Menurut Kelompok Usia 67

Tabel 4.4. Komposisi Responden Menurut Pendidikan Terakhir 68

Tabel 4.5. Komposisi Responden Menurut Jenis Usaha 69

Tabel 4.6. Komposisi Responden Menurut Usia Usaha 69

Tabel 4.7. Komposisi Responden Menurut Pendapatan Usaha 70

Tabel 4.8. Komposisi Responden Menurut Lokasi Usaha 71

Tabel 4.9. Item *Loading* dan AVE pada Model Awal 74

Tabel 4.10. Item *Loading* dan AVE pada Model Akhir 76

Tabel 4.11. *Cross Loading* pada Model Akhir 77

Tabel 4.12. Akar Kuadrat AVE dan Korelasi Antar Variabel 78

Tabel 4.13. Hasil *Outer Model* 79

Tabel.4.14. Nilai AVE dan *Adjusted* R-Square 81

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Hipotesis 83

Tabel 4.16. Nilai *R-Square Adjusted* 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 46

Gambar 4.1. Hasil Model Penelitian 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian 108

Lampiran II Tabel Induk Kuesioner..... 116

Lampiran III Hasil Olah Data 121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Virus Covid-19 telah berdampak diberbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, sampai ke aspek stabilitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Serangan Pandemi ini juga mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktifitas maupun tugas-tugasnya setiap hari baik itu pekerja, pelajar, mahasiswa, pengusaha dan masyarakat umum lainnya (Mar'linah, 2020).

Pasca pandemi Corona Virus *Disease* (Covid) 2019 menyebar di Indonesia membuat seluruh aktivitas kehidupan mengalami gejolak penurunan yang serius, tak terkecuali dalam dunia usaha teutama bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sehingga, *World Health Organization* (WHO) secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada awal Maret 2020, yang berarti virus corona telah menyebar secara luas ke seluruh dunia. Berdasarkan penetapan tersebut, maka seluruh aktivitas di Indonesia mulai dibatasi, salah satunya dunia usaha, khususnya bisnis UMKM (Mar'linah, 2020).

Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini akan menghambat roda pergerakan bisnis UMKM diseluruh Indonesia. Banyak UMKM yang terpaksa yang berhenti menjalankan bisnisnya karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Maka para pengusaha UMKM harus mencari arternatif dan inovasi agar bisnis tetap berjalan dimasa pandemi dengan bisnis secara online itu menjadi solusinya (Mar'linah, 2020).

Bisnis online atau transaksi online adalah suatu kegiatan dan aktifitas yang dilakukan dari media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis dikehidupan konvensional, bisnis online yang dijalankan via internet ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan suatu keuntungan (Fitriandi, 2020).

Manfaat dan keuntungan menggunakan internet adalah untuk media pemasaran dan promosi dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan, baik untuk penjualan online maupun konvensional. Di samping keuntungan tersebut, hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan bisnis online dapat meningkatan volume penjualan dan mempromosikan produk - produk industri baik barang maupun jasa (Lestari, 2020). Hal ini didukung dengan penelitian Pradiani (2017) yang menyatakan bahwa bisnis online akan meningkankan penjualan pada industri perumahan di malang.

Transaksi bisnis online sekarang ini banyak menjadi bahan perbincangan karena digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kegiatan usahanya dimasa pandemi. Hal ini dikarenakan semakin majunya teknologi seperti sekarang ini menjadi sarana untuk mempertahankan usahanya bagi wajib pajak UMKM. Contohnya penjualan barang dagangan dengan memanfaatkan media elekronik melalui jejaring sosial berupa Twitter, Facebook, Instagram dan berbagai market place lainnya (Arisandy, 2017).

Berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional, transaksi bisnis online memiliki banyak permasalahan. Salah satunya bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan internet atau online dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat, tetapi belum banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak usahanya.

Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Bisnis Online menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis online maupun transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.

Permasalahannya transaksi bisnis online sulit dikenai pajak, karena dengan *Self Assessement System* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya (Mardiasmo, 2018). Hal ini dikarenkan pada transaksi bisnis online tidak menjelaskan berapa besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak dalam bisnisnya dan transaksi bisnis online hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan belum menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak. Hal ini dukung dengan penelitian Arisandy (2017) yang meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan pajak.

Tax ratio adalah suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Adapun definisi sederhana *tax ratio* yaitu perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam

produksi (Mardiasmo, 2018). Berikut ini data perbandingan *tax ratio* negara – negara di ASEAN yang di sajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan *Rasio* Pajak di Negara ASEAN

Negara	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vietnam	19.0	19.1	18.2	18.0	17.9	18.7
Thailand	18.5	19.3	18.4	18.9	18.1	17.6
Filipina	15.8	16.2	16.7	17.0	17.0	17.5
Kamboja	11.3	12.9	15.5	15.6	15.8	16.9
Singapura	13.6	13.3	13.4	13.1	13.1	14.1
Malaysia	16.1	15.8	15.3	14.8	14.2	13.6
Laos	15.5	15.8	13.9	13.1	12.4	12.3
Indonesia	12.5	12.5	12.2	12.1	12.0	11.5
Myanmar	3.9	6.3	7.3	7.8	7.5	7.8

Sumber : IMF & World Bank, 2020

Berdasarkan tabel di atas, *tax rasio* pajak di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara – negara di ASEAN. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Menurut Luzuriaga dan Carlos (2019), kepatuhan perpajakan dapat didefinsikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya atau membayar pajak sesuai aturan perpajakan.

Dengan sistem *self assessment system* tentu kebijakan pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan. Penilaian positif wajib pajak terhadap kebijakan pajak dari pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak (Arisandy, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) yang menunjukkan hasil positif kebijakan *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Adanya potensi pajak yang tidak tergali ini dikarenakan dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam peraturan perpajakan. Sebagaimana Hardiningsih (2018) menjelaskan pengetahuan pajak adalah cara wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan yang telah ada. Semakin wajib pajak berpengetahuan tinggi tentang pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak. Ini dapat dilihat dalam penelitian Subarkah dan Maya (2017) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi), atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah *(preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk terciptanya kepatuhan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung penelitian Rahayu (2017) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah varibel yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu variabel yang berasal dari faktor ekternal dan internal wajib pajak (Alfiyah & Latifah 2017). Faktor ekternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti variabel kualitas pelayanan KPP, sanksi pajak, kebijakan *tax amnesty* dan lain sebagainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri seperti variabel tingkat pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan lain – lain.

Pada penelitian ini menggunakan variabel yang berasal dari faktor ekternal dan internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Variabel yang berasal dari faktor ekternal yaitu kebijakan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak. Sedangkan variabel yang berasal dari faktor internal yaitu pengetahuan pajak. Tetapi dalam penelitian ini insentif pajak digunakan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi ini dapat bersifat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent dan variabel dependent. Dengan adanya insentif atau pengurangan pajak akan mempengaruhi pengaruh atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Nurul & Wiwit, 2019).

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan sebagian besar mendukung pengetahuan pajak dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Subarkah & Maya, 2017). Dengan banyaknya hasil yang mendukung bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka penelitian ini meneliti kembali variabel tersebut dengan menggabungkan variabel lain yang belum pernah diteliti seperti kebijakan pajak dan insentif pajak dengan responden, lokasi, dan waktu penelitian yang berbeda.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak pada transaksi online pada UMKM di provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung agar semakin jujur, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, maka dirasa perlu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM. Dengan demikian diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bagi transaksi online UMKM baik bagi pemerintah maupun bagi khalayak luas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM ?
4. Apakah insentif pajak memoderasi atas pengaruh peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM.
4. Untuk menguji dan menganalisis insentif pajak memoderasi peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan teori yang mendukung penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut serta menambah informasi yang berkaitan dengan teori pemungutan pajak dalam hubungannya dengan sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta dampak terhadap penerimaan pajak pada transaksi online UMKM.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak pada transaksi online UMKM.

   a. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak pada transaksi online UMKM.
   b. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.
   c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi pada transaksi online UMKM.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing bab secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas dan menjabarkan tentang teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian, pupulasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan definisi operasional, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai perhitungan penelitian yang meliputi hasil analisi data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada dan alat analisis yang di perlukan, serta hasil dari kesimpulan penelitian yang terbukti atau tidaknya hipotesis penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Kelley (1972). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal) namun juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

Kelley (1972) mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan

   Mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Namun apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu saja, maka berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Kosensus

   Mengacu apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu akan dilakukan oleh orang lain. Bila tidak semua orang merespon dengan cara sama maka perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain

juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh eksternal.

3. Konsistensi

   Mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama seara konsisten. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal berpengaruh.

2.1.1. Keterkaitan Teori Atribusi

Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Menurut teori atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor ekternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ekternal dalam penelitian ini adalah kebijakan pajak, sanksi dan insentif pajak sedangkan faktor internal adalah pengetahuan pajak untuk mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Hal ini didukung dengan penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) yang menggunakan teori artibusi untuk menguji pengaruh *sunset policy, tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak untuk mengetahui faktor-faktor yang

kepatuahan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Andika (2019) menggunakan teori artibusi untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten magelang.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Sumarsan, 2016). Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum di samping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakan partisipasi rakyat kepada negara (Yuhertiana, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik. Besar

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Menurut Mardiasmo (2018) unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara yaitu negara berhak memungut iuran dari rakyat. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dan kontrapretasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontrapretasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak :

1. Fungsi *Budgetaire* (Anggaran)

   Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui pajak (Sari, 2013).

2. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

   Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Sari, 2013).

2.1.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. *Equality*

   Pembebanan pajak harus seimbang dengan kemampuannya. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

   Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi *(not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

   Pajak hendaknya dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak, yaitu pada waktu dekat dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economy of collection*

   Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Adapun asas pemungutan pajak Menurut Resmi (2017) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

   Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

   Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

   Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Sistem *Official Assessment*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Sistem *Self Assessment*

   Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Sistem *Withholding*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.5. Penggolongan Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat pembedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Pembedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada kriteria misalnya siapa yang membayar pajak, siapa yang memikul beban pajak, apakah beban pajak dapat dialihkan, siapa yang memungut, sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan dan sebagainya (Priantara, 2016).

Salah satu jenis penggolongan pajak ialah pajak pusat dan pajak daerah. Pembedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga mana atau instansi mana yang memungut pajak. Jika yang memungut pajak pemerintah pusat dalam hal ini adalah DJP maka golongan ini disebut pajak pusat atau pajak negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea materai. Sedangkan jika yang memungut pemerintah daerah maka golongan ini disebut pajak daerah. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan sebagainya (Priantara, 2016).

2.3. Bisnis Online

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung

antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. Jual beli online disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik. Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur di dalam manajemen inventori otomatis (Zhang et al., 2020).

Bisnis Online adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis dikehidupan nyata, bisnis online yang di jalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu keuntungan. Menurut situs wikipedia.org, bisnis online dikenal dan digambarkan sebagai perdagangan elektronik (Sakti, 2014). E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis".

Perdagangan Elektronik (*E-Commere = electronic commerce*) adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun. Menurut Kalakota dan Winston, definisi *E-Commerce* dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu (Suyanto, 2007) :

a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
c. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan *(service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
d. Dari perspektif online, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya".

2.3.1. Pajak Bisnis Online pada UMKM

Pajak yang terdapat pada transaksi bisnis online atau *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

2.3.1.1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri atau di luar negeri, yang terutang selama tahun pajak. Bagi pengusaha *e-commerce* atau bisnis online dengan penghasilan hingga Rp4,8 Miliar dalam setahun, selama ini dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet. Aturan tersebut

termasuk dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun dalam PP nomor 23 tahun 2018 pajak e-commerce, pemerintah menerapkan PPh final yang lebih rendah yaitu sebesar 0,5%. Penurunan tarif ini merupakan dukungan serta stimulus dari pemerintah agar bisnis e-commerce semakin berkembang.

a. Objek Pajak Penghasilan

   Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 objek pajak penghasilan yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini adalah:

   1) Pengahasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun.
   2) Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
   3) Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

b. Subjek Pajak Penghasilan

   Subjek pajak penghasilan yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

   1) Orang Pribadi
   2) Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun.

c. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang digunakan pada PP nomor 23 tahun 2018 adalah PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar.

d. Dasar Penentuan Pajak Penghasilan

Dikenakan PPh Final 0,5%. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (setahun) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

1) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
3) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pahak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

2.3.1.2. Pajak Pertambahan Nilai

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi (Resmi, 2017). Dalam dirjen pajak, PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pembelian barang kena pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean.

Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap pengusaha, termasuk para pelaku bisnis *online* wajib menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha atau para pelaku bisnis *online* yang dimaksud adalah mereka yang memiliki omzet di

atas Rp4,8 Miliar setiap tahun. Aturan tersebut telah ditetapkan sejak 1 Januari 2014. Setiap tahun, PKP wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksi dan menyetorkannya ke kas negara.

Jika seorang pengusaha atau pelaku bisnis *online shop* sudah membayar PPN 10% ketika membeli barang dari pemasok (supplier) atau distributor, pengusaha tersebut bisa mendapatkan faktur pajak dari pemasok atau distributor. Faktur pajak ini bisa dilampirkan dan menjadi faktor pengurang ketika pengusaha atau pelaku bisnis akan membayar PPN atas penjualan barang tersebut kepada *end user*.

a. Objek PPN
    1) Penyerahan /impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud.
    2) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya diigunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
    3) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan dapat dikreditkan.
b. Subjek PPN

    Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

c. Tarif Pengenaan PPN

1) Tarif PPN adalah 10%. Dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya pertimbangan perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang besar, sehingga tarif PPN bisa dinaikkan.
3) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak.

2.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

2.4.1. Kebijakan Pajak

Kebijakan adalah rangkaian konsep atas asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud

sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran (Sari, 2018). Sehingga kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang dapat berupa aturan tertulis dan dasar rencana sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Sedangkan menurut Subarsono (2016) menulis dalam bukunya bahwa menurut Dye (1981) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhak menentukan pilihan atau aturan yang akan dibuat, dimana aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu keputusan tersebut yang dibuat harus mementingkan kepentingan rakyat.

Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan. Kebijakan pajak dibagi dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian luas dan pengertian sempit. Kebijakan pajak dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyaraat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan pajak dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang (Sari, 2018).

Selanjutnya Rosdiana dan Edi (2012) menyatakan untuk membuat kebijakan fiskal harus didasarkan pada siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tatacara pembayaran pajak yang terhutang. Contoh kebijakan pajak ini adalah ketentuan mengenai diperbolehkannya penggunaan

norma penghitungan penghasilan netto atau yang dalam literatur disebut sebagai *presumptive tax* atau *deemed profit*.

2.4.2. Pengetahuan Pajak

Menurut Nugroho dan Zulaikha (2016) pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum serta segala tata cara perpajakannya, meliputi: cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Di Indonesia menganut sistem *self assessment*, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya.

Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih & Yulianawati, 2018).

Menurut Pohan (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Resmi (2017) yaitu wajib pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

2.4.3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Mardiasmo, 2018). Sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Suhendri, 2018). Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi), atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah *(preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi

perpajakan bertujuan untuk terciptanya kepatuhan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi pidana

   Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

   a. Denda pidana

      Denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak, pejabat atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

   b. Pidana kurungan

      Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran

   c. Pidana penjara

      Pidana penjara yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2. Sanksi administrasi

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa :

a. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayar pajak.
b. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.4.4. Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) kepatuhan mempunyai arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan adalah tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Sari, 2013).

Menurut Luzuriaga dan Carlos (2019), kepatuhan perpajakan dapat didefinsikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan

yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Kogler et al., 2020). Kepatuhan perpajakan merupakan sikap tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan dalam perpajakan. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Resmi (2017), ada 2 macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Sari (2013) mengemukakan ada 3 strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui administrasi perpajakan yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
3. Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat mengurangi ketidakpatuhan.

2.4.5. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang

bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut UNTAD *(United Nations Conference on Trade and Development)* insentif pajak adalah sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi diproyek dan sektor tertentu (Prasetya & Gayatri, 2017).

Menurut Holland dan Vann (1998) dalam Buletin APBN (2018) mengkategorikan insentif pajak yaitu *tax holiday* berupa insentif yang ditunjukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperas. *Investmen allowance* berupa insentif yang didasarkan pada besarnya jumlah pengeluaran dari investasi yang bersangkutan, *tax credit* digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, *timing differences.*

Insentif muncul disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan atas akun-akun tertentu. *Reduced tax rates* berupa insentif pajak yang diberikan dengan pengurangan tarif pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada dibawahnya atau lebih rendah dan *administrative discretion*, berupa insentif yang memiliki proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak.

Di Indonesia fasilitas pajak yang diberikan tercantum dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pemberian fasilitas pajak kepada investor yang melakukan penanaman modal dibidang usaha tertentu dan di daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015. Sementara itu, juga terdapat fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka

penanaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010. Fasilitas ini dikenal dengan *tax holiday*. Baik *tax allowance* maupun *tax holiday* sama-sama memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak penghasilan badan, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan menggunakan variabel yang berbeda, jenis pajak, teknik analisis dan lokasi atau tempat penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini menggunakan variabel kebijakan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen, sedangakan insentif pajak sebagai variabel moderasi untuk variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
1.	Fahmi (2016)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Pengetahuan pajak • Kualitas pelayanan pemerintah daerah • Kesadaran wajib pajak	• Kuantitatif • *Non probability sampling* • 100 responden wajib pajak orang pribadi di kabupaten Belitung Timur • Regresi linier berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Pengetahuan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Rahayu (2017)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Pengetahuan pajak • Ketegasan sanksi pajak • Tax amnesty	• Deskriptif kuantitatif • *Probability sampling* • 132 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama kabupaten Bantul • Regresi linier berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Bantul • Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel *tax amnesty*

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Lanjut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
3.	Notohatmodjo (2017)	**Dependen :** Tingkat kepatuhan pajak **Independen :** • Pemahaman Pajak • Kesadaran Pajak • Pelayanan Fiskus • Sanksi Pajak	• Deskriptif kuantitatif • *Convenience sampling* • 120 responden wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten • Regresi linier berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Pemahaman pajak, kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten
4.	Tulenan & Sondakh (2017)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Kesadaran wajib pajak • Kualitas pelayanan fiskus • Sanksi pajak	• Deskriptif kuantitatif asosiatif • *Convenience sampling* • 150 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung • Regresi linier berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Lanjut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
5.	Rheny & Fajar (2017)	**Dependen :** Niat melakukan *whistleblowing* **Independen :** • Lingkungan Etika **Moderasi :** • *Locus of control*	• Deskriptif kuantitatif asosiatif • *Random Sampling* • 90 responden staff SAMSAT di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu • Regresi linier berganda berbasis SPSS • *Theory of Planned Behavior*	• Lingkungan etika berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* dan locus of control dapat memoderasi lingkungan etika terhadap niat melakukan *whistleblowing*
6.	Nurul & Wiwit (2017)	**Dependen :** Kebijakan dividen **Independen :** • Kepemilikan manajerial • *Effective tax rate* **Moderasi :** • *Likuiditas*	• Kuantitatif berupa data sekunder dari BEI • *Purposive Sampling* • 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 • Regresi linier berganda berbasis SPSS • *Agency Theory*	• Kepemilikan manajerial dan *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 • Likuiditas tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 • Likuiditas berhasil memoderasi hubungan antara *effective tax rate* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Lanjut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
7.	Danarsi (2017)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Pemahaman • Tarif pajak • Kualitas pelayanan • Kesadaran perpajakan • Sanksi perpajakan	• Deskriptif kuantitatif asosiatif • *Random Sampling* • 30 responden wajib pajak yang membayarkan pajak di SAMSAT Surakarta • Regresi linier berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Pemahaman tentang sistem perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif • Tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.
8.	Subarkah & Maya, (2017)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Pemahaman • Kesadaran • Kualitas pelayanan • Ketegasan sanksi	• Deskriptif kuantitatif asosiatif • *Quota sampling non probability sampling* • 30 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo • Regresi linier berganda berbasis SPSS • *Theory of Planned Behavior*	• Pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Lanjut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
9.	Alfiyah & Latifah (2017)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Sunset policy • Tax amnesty • Sanksi pajak	• Deskriptif kuantitatif asosiatif • *Random sampling* • 58 responden WPOP di KPP Pratama Jakarta Pademangan • Regresi linier berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak
10.	Amran (2018)	**Dependen :** Kepatuhan pajak **Independen :** • Sanksi perpajakan • Tingkat pendapatan • Kesadaran wajib pajak	• Kuantitatif • *Sampling incidental* • 100 responden WPOP di KPP Pratama Makasar Utara • Regresi linier berganda berbasis SPSS • *Theory of Planned Behavior* dan Teori atribusi	• Sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Lanjut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
11.	Muliari & Setiawan (2019)	**Dependen :** Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi **Independen :** • Persepsi tentang sanksi perpajakan • Kesadaran wajib pajak	• Deskriptif kuantitatif metode survey • *Random sampling* • 100 responden WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur • Regresi linear berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Persepsi wajib pajak tentang sanksi dan perpajakan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Lanjut

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel , dan Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
12.	Yasa (2020)	**Dependen :** Penerimaan pajak daerah **Independen :** • Kesadaran wajib pajak • Reformasi administrasi perpajakan • persepsi atas sanksi perpajakan **Intervening** Kepatuhan pajak	• Deskriptif kuantitatif metode survei • *Incidental sampling* • 100 responden WPOP membayarkan pajak di SAMSAT Denpasar • Regresi linear berganda berbasis SPSS • Teori atribusi	• Kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak.

2.6. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1. Pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak

Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan. Kebijakan pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak, semakin baik kebijakan pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Sari, 2018). Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, kebijakan pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Persepsi yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses peraturan dibidang perpajakan tentu akan mempengaruhi wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini didukung dengan penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) yang meneliti tentang pengaruh kebijakan *sunset policy, tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. *Sunset policy* dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi aspek-aspek formal kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menyajikan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.6.2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

Pengetahuan adalah hasil pemahaman manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Nugroho & Zulaikha, 2016).

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh, apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakanya. Dengan adanya pengetahuan pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil jumlah pajak yang terhutang dengan *tax planning*. Maka dengan jumlah pajak yang kecil wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah, karena wajib pajak merasa membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya pengetahuan pajak tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Karena mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan pajak, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap apa yang telah didapatkan dari proses belajar tersebut. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Rachmawati (2019) menyatakaan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak untuk berperilaku patuh. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2:Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.6.3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

Sanksi pajak adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Sanksi pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak. Semakin tegas sanksi pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Suhendri, 2018).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh sanksi pajak. Persepsi yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses sanksi yang diterapkan dibidang perpajakan tentu akan mempengaruhi wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Subarkah dan Maya (2017) menemukan bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Sejalan dengan penelitian Rahayu (2017) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menyajikan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.6.4. Pengaruh moderasi insentif pajak atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Prasetya & Gayatri, 2017). Insentif pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak karena insentif pajak pengurangan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan, dengan pengurangan besarnya pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini insentif pajak dijadikan variabel moderasi atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori atribusi, insentif pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh insentif pajak. Persepsi yang terbentuk dilingkungan sekitar kepada instansi perpajakan melalui proses peraturan dibidang perpajakan tentu akan mempengaruhi wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Insentif pajak bagi wajib pajak akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan, sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dibidang perpajakan. Kebijakan insentif pajak yang baik akan

meningkatkan kepatuhan pajak, karena akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak. Dengan beban pajak yang kecil maka akan lebih mudah wajib pajak membayar beban pajaknya. Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut yaitu kebijakan *tax amnesty* atau pengurangan pajak di bidang perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak (Alfiyah & Latifah ,2017). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam ini sebagai berikut:

H_4: Insentif pajak berpengaruh positif atas peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak

Wajib pajak sudah sebaiknya mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, agar beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat berkurang. Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi suatu hal yang sebaiknya diketahui wajib pajak, sehingga insentif pajak akan mempengaruhi pengetahuan pajak untuk memperkecil beban pajaknya melalui insentif. Dengan beban pajak yang kecil maka wajib pajak akan mudah membayar pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_5: Insentif pajak berpengaruh positif atas peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

Dengan wajib pajak mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan pemerintah. Diharapkan agar wajib pajak memanfaatkan insentif yang diberikan untuk pengurangan beban pajaknya, dan tidak melanggar peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk melanggang

ketentuan dibidang perpajakan untuk pengurangan jumlah yang dibayarkan (Suhendri, 2018). Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi suatu cara agar wajib pajak bisa mengurangkan beban pajak tanpa harus melanggar peraturan untuk mengurangi beban pajak yang terhutang bagi wajib pajak, sehingga insentif pajak akan mempengaruhi sanksi pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang disajikan adalah sebagai berikut:

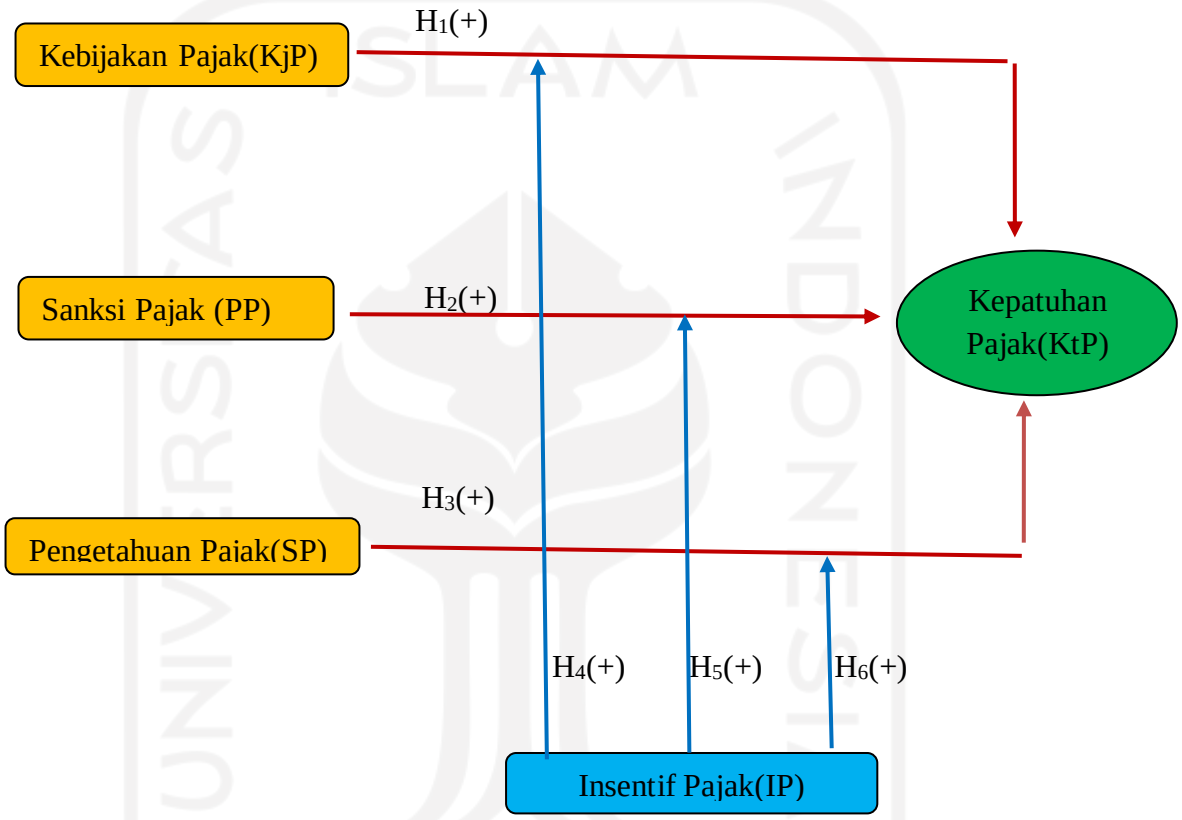
H_6: Insentif pajak berpengaruh positif atas, peranan sanksi terhadap kepatuhan pajak

2.7. Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan berbagai konsep yang diteliti yang arahnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian. Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan. Misalnya karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

Terkait dengan kepatuhan pajak jika dipandang menurut teori atribusi bahwa untuk dapat mencapai target penerimaan pajak pada bisnis online perlu adanya kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yaitu kebijakan

pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak. Insentif pajak sebagai variabel moderasi atas variabel kebijakan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil uraian kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan konsep seperti disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2016), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada akhir hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas subyek penelitian yang diperoleh dari data penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Yogyakarta, Jawa tengah, dan Lampung. Sedangkan untuk sampel pada penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi online pada UMKM di wilayah Yogyakarta, Jawa tengah, dan Lampung. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Arikunto, 2011).

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini menggunakan metode survey dengan bantuan kuesioner. Kuesioner tersebut akan disampaikan melalui google from dan langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi online UMKM di wilayah Yogyakarta, Jawa tengah, dan Lampung. Metode penyebarannya kuesioner dengan *convenience sampling* adalah pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan mendapatkan data (Arikunto, 2011). Proses pengambilan sampel atau data dalam penelitian ini memiliki kriteria:

a. Sampel diambil dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha UMKM dan melakukan transaksi online untuk bisnisnya.
b. Sampel diambil dari wajib pajak orang pribadi di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung.

Sampel yang diambil dalam melakukan penelitian berjumlah 180 responden. Penentuan jumlah sampel responden didasarkan pada menurut pernyataan menurut Hair et al (2014) sebaiknya ukuran sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, jumlah sampel minimum setidaknya 5 (lima) kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini terdapat 36 item pertanyaan, maka ukuran sampel yang dibutuhkan sejumlah 36 x 5 = 180. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 180 responden.

Perlu diperhatikan bahwa penentuan pelaksanaan pengambilan sampel dan jumlah sampel dilakukan berdasarkan keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam hal biaya dan waktu. Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini terdiri atas

sejumlah pertanyaan tertulis dengan disusun secara terstruktur untuk memperoleh data yang akurat mengenai variabel yang diteliti oleh peneliti (lihat lampiran).

3.4. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemberian definisi kepada suatu variabel yang memberikan penjelasan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel penelitian mempunyai definisi tersendiri yang digunakan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak orang pribadi membayar pajak transaksi online pada UMKM sedangkan untuk variabel independen yaitu kebijakan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan variabel moderasi adalah insentif pajak. Masing-masing variabel tersebut diukur menggunakan indikator-indikator yang dikembangkan dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner. Agar jawaban responden dapat diukur, maka jawaban responden diberi skor dengan menggunakan interval (Kanning & Hill, 2013) yang mengacu pada model skala likert, sehingga variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator dalam penelitian ini diukur menggunakan skala dengan interval 1-6. Skala 1 sampai dengan skala 2 menjelaskan mengenai tingkat persepsi tidak setuju terhadap pertanyaan dan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, mulai dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), dan skala 3 sampai 4 menjelaskan mengenai tingkat persepsi agak satuju atau ragu – ragu untuk menyetujuinya pertanyaan dan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mulai Agak Tidak Setuju (3), Agak Setuju (4). Sebaliknya skala hingga 5 sampai skala 6 menjelaskan tingkat persepsi setuju terhadap

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, mulai dari Setuju (5), Sangat Setuju (6).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini tidak dibangun dari awal, melainkan pengembangan dari studi sebelumnya. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang dikelompokkan seperti disajikan pada bagian berikut di bawah ini.

3.4.1. Kebijakan Pajak (KjP)

Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan pada transaksi online UMKM (Sari, 2018). Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak. Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang pada transaksi online UMKM (Sari, 2018). Berikut ini tabel indikator kebijakan pajak yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator Kebijakan Pajak

Variabel	Indikator	Sumber
Kebijakan Pajak (KjP)	Kebijakan pajak yang baik memberikan kesempatan kepada Anda yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	Alfiyah & Latifah (2017)
	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda mendapatkan NPWP	
	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda melakukan kewajiban perpajakan transaksi online UMKM	
	Kebijakan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak transaksi online UMKM	
	Kebijakan pajak menjadi dasar wajib pajak membayar pajak transaksi online UMKM	
	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda membayar pajak transaksi online UMKM	
	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda mepertahankan usaha transaksi online UMKM di masa pandemi	

3.4.2. Pengetahuan Pajak (PP)

Pengetahuan pajak adalah seberapa besar pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak pajak pada transaksi online UMKM (Lestari & Yaya, 2017). Berikut ini tabel indikator pengetahuan pajak yang dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Variabel	Indikator	Sumber
Pengetahuan Pajak (PP)	Setiap orang yang memiliki usaha dan berpenghasilan harus memiliki NPWP	Prabowo (2019)
	Kepemilikan NPWP adalah indentitas bagi wajib pajak	
	Kepemilikan NPWP adalah sarana untuk pengadministrasian pajak	
	Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP maka wajib melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan	
	Wajib pajak yang sudah ber NPWP mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajak secara berkala	
	Wajib pajak yang terlambat membayar dan melaporkan pajak akan diberikan peringatan	
	Wajib pajak yang terlambat membayar dan melaporkan pajak akan diberikan sanksi	
	Besarnya pajak akan dikenakan kepada wajib pajak yang telah memiliki penghasilan sesuai ketentuan undang – undang	
	Fungsi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara	

3.4.3. Sanksi Pajak (SP)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi) atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan pada transaksi online UMKM. Berikut ini tabel indikator sanksi pajak yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Sanksi Pajak

Variabel	Indikator	Sumber
Sanksi Pajak (SP)	Sanksi pajak diberikan atas pelanggaran pajak yang di lakukan	Alfiyah & Latifah (2017)
	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak	
	Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	
	Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak	
	Pengenaan sanksi pajak berdasarkan ketentuan undang – undang	
	Pengenaan sanksi dilaksanakan kepada Wajib pajak yang melakukan pelanggaran	
	Pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.	

3.4.4. Kepatuhan Pajak (KtP)

Kepatuhan pajak dapat didefinsikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya pada transaksi online UMKM (Sari, 2013). Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku pada transaksi online UMKM. Berikut ini tabel indikator kepatuhan pajak yang dijelaskan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Indikator Kepatuhan Pajak

Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan Pajak (KtP)	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan dan keinginan sendiri	Prabowo (2019)
	Saya selalu mengisi SPT(Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perpajakan	
	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu	
	Saya selalu membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri	
	Saya selalu melaporkan pendapatan sesuai dengan kondisi yang ada	
	Saya berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan kewajiban bagi warga negara	
	Saya berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik	

3.4.5. Insentif Pajak (IP)

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan pada transaksi online UMKM (Prasetya & Gayatri, 2017). Berikut ini tabel indikator insentif pajak yang disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indikator Insentif Pajak

Variabel	Indikator	Sumber
Insentif Pajak (IP)	Sebagai wajib pajak, Anda dapat memanfaatkan Insentif pajak transaksi online usaha UMKM	Alfiyah & Latifah (2017)
	Insentif pajak dapat berupa pengurangan atau pembebasan beban pajak transaksi online usaha UMKM	
	Insentif pajak dapat mengurangi beban pajak transaksi online usaha UMKM	
	Insentif pajak akan meringankan wajib pajak melakukan kewajiban pajak transaksi online usaha UMKM	
	Insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan transaksi online usaha UMKM	
	Insentif pajak dari pemerintah dapat membantu usaha transaksi online UMKM bertahan di masa pandemi	

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis ini pada intinya dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif akan dilakukan pada data primer yang telah dikumpulkan, dengan memberikan skor/nilai untuk setiap item pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan secara simultan dan dibantu dengan program aplikasi SmartPLS 3.0 (Ghozali & Latan, 2015).

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan dengan menggambarkan karakteristik responden yaitu kegiatan untuk menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel

penelitian yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian dan bermanfaat dalam memberikan penjelasan hasil analisis *inferensial* atau hipotesis. Analisis deskripsi dilakukan terhadap variabel kebijakan pajak (KjP), pengetahuan pajak (PP), sanksi pajak (SP), insentif pajak (IP), dan kepatuhan pajak (KtP). Untuk melakukan analisa akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel.

2.5.2. Analisis *Inferensial*

Analisis inferensial adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok sampel data dari data populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data populasi. Analisis inferensial merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data populasi tersebut (Ghozali, 2013).

Analisis yang digunakan yaitu metode analisis utama dan akan dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Modelling (SEM)* berbasis *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan *software* SmarPLS 3.0. PLS digunakan dan cocok untuk memprediksi aplikasi dan membangun teori, dapat menganalisis sampel berukuran kecil, dan dapat menguji dengan fit model secara keseluruhan (*overall model fit*) dengan baik (Gefen et al, 2000). *Software* Smar PLS 3.0 yang digunakan memiliki kelebihan yaitu dapat menguji hubungan variabel pemoderasi yang bersifat langsung (Solihin & Ratmono, 2013).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menentukan *composite reliability*, apabila nilai *composite reliability* > 0.8 dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliabel dan > 0.6 dikatakan cukup reliable (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa pertanyaan dari instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria faktor *loadings (cross loadings factor)* dengan nilai > 0.5 dari *average variance extracted* (AVE).

3.5.2.1. Uji Validitas

Evaluasi model struktural atau *inner* model bertujuan untuk melihat signifikansi hubungan antara variabel laten dalam model penelitian, dengan melihat koefisien jalur (*path coefficient*) yang yang menujukkan ada atau tidak ada hubungan (prediksi) antara variabel laten dalam model penelitian. Untuk melakukan evaluasi model struktural dimulai dari melihat nilai *R-Square* yang merupakan uji *goodness-fit* model. Uji *R-Square* dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel - variabel indepeden dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini tentunya perlu dan apabila juga memiliki nilai *average* variance *expected* (AVE) untuk setiap variabel di atas 0.5. (Fornell & Larcker, 1981). Selanjutnya Fornell dan Larcker (1981) juga menjelaskan bahwa, apabila terdapat suatu kondisi dimana ditemukannya nilai loading item pertanyaan yang memiliki nilai dibawah 0.5, maka tindakan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan *drop* pada item tersebut. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak mempengaruhi nilai AVE.

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item-item pertanyaan (indikator) apakah mampu menghasilkan pengukuran yang sama dalam waktu yang berbeda-beda (Lestari & Yaya, 2017). Latan dan Ghozali (2015) menyatakan suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* setiap variabel. Reliabilitas terpenuhi apabila nilai *composite reliability* lebih dari 0.7 (Latan & Ghozali, 2015).

2.5.3. Metode *Partial Least Square* (PLS)

Partial Least Square (*PLS*) adalah salah satu teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung. Oleh karena ketika teori yang digunakan lemah atau indikator yang tidak memenuhi model pengukuran reflektif atau data tidak berdistribusi normal maka muncul PLS sebagai alternatif pilihan (Wiyono, 2011). *Structural Equation Modelling* (SEM) atau pemodelan persamaan struktural yaitu suatu teknik yang menggabungkan aspek-aspek analisis regresi berganda dan analisis faktor yang membantu peneliti dalam menguji secara serentak sederetan hubungan dependensi antara variabel terukur dan antar variabel. PLS merupakan *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis *variance* yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran (*outer model*) sekaligus pengujian model struktural (*inner model*). Model pengukuran digunakan untuk Uji Validitas dan Realibitas, adapun model struktural untuk menguji kausalitas (Wiyono, 2011).

Pada penelitian ini menggunakan PLS, karena PLS merupakan metode analisis data didasarkan asumsi sampel tidak harus besar yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis dan *residual distribution*. PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi. PLS memungkinkan *algoritma* dengan menggunakan analisis series *Ordinary Least Square* (OLS) sehingga dapat diperoleh efisiensi perhitungan *algoritma* (Ghozali & Latan, 2015). Selain itu PLS diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* dapat digunakan untuk menjelaskan.

2.5.3.1. Langkah – Langkah Metode *Partial Least Square* (PLS)

Dalam pengujian model dengan menggunakan PLS, terdapat enam langkah yang akan ditempuh (Ghozali & Latan, 2015), sebagai berikut :

1. Spesifikasi Model membuat *Inner Model* yang menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan pada substansi teori. Membuat *Outer Model* yang menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabelnya.
2. Membuat Diagram Jalur, hasil perancangan dari *Inner Model* dan *Outer Model* selanjutnya dapat dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. Kemudian menyusun model struktural yaitu menghubungkan dan menyusun model antar variabel dependen maupun independen dengan indikator.
3. Konversi Diagram Jalur kedalam Persamaan, setelah model dikembangkan dalam sebuah diagram jalur, selanjutnya dikonversikan kedalam model persamaan yang spesifik, sehingga dapat diketahui berapakah nilai dari besar pengaruh diantara variabel dan indikatornya.

4. Pendugaan Parameter, setelah model dispesifikasikan secara lengkap kedalam persamaan, kemudian melakukan pendugaan terhadap parameter dari variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) dengan tujuan mengestimasi model teoritis dengan mengukur kebaikan model pada variabel dan parameter yang diestimasi atau indikatornya. Pendugaan parameter melihat nilai *Weight Estimate* yang akan menghasilkan skor atau nilai *outer weight* yang fungsinya untuk melihat pengaruh yang paling dominan, melihat nilai *Path Estimate* akan menghasilkan nilai *outer loading* yang menunjukkan keterkaitan antara variabel dengan indikatornya.
5. Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit* :
    a. Evaluasi Model Pengukuran Refleksi (*Outer Model*) yaitu skor yang dinilai berdasarkan korelasi yang dihitung, diukur dengan *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reability*. Adapun *Convergent Validity* (CV) yaitu untuk mengetahui validitas setiap indikator yang digunakan dalam penelitian. Jika nilai CV rendah hal itu menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut kurang baik untuk mewakili variabel bentukan yang dikembangkan. Apabila nilai *loading factor* memenuhi kriteria nilai minimal 0.5 maka loading faktor terebut dapat dikatakan sebagai indikator yang baik. Adapun *Discriminant Validity* (DV) yaitu pengukuran pada indikator bersifat refleksif, didasakan pada nilai *cross loading* indikator dengan variabel. Nilai DV > 0.5 maka variabel tersebut sudah menjadi pembanding yang baik untuk model. *Composite Reability* (CR) adalah uji untuk menunjukkan tingkat konsistensi atau sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya untuk

diandalkan. Nilai CR > 0.70 menunjukan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian telah *realible* namun nilai 0.6 dengan pendekatan eksplanatori masih dapat diterima. Cara lain untuk menguji DV dengan membandingkan nilai akar *Average Variance Extracted* (AVE) dengan nilai korelasi antar variabel laten. Nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar variabel laten.

b. Evaluasi Model Pengukuran Struktural (*Inner Model*) yaitu evaluasi *Goodness of Fit* dari *inner model* yaitu memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Terdiri dari uji R-*square* (R^2), uji T-Statistik dan Hipotesis. Nilai R^2 digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh substantif. Nilai R-*square* (R^2), 0.75 dapat disimpulkan model kuat, 0.50 model moderat dan 0.25 model lemah.

6. Proses *Bootstrapping*, parameter uji T-statistik untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Uji T-Statistik yaitu membandingkan antara hasil T-hitung (T-statistik) dengan T-tabel. Uji T dengan tingkat signifikansi pada 0.05 (T-hitung > T-tabel) parameter jalur struktural. Hipotesis dirumuskan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_A) yang kemudian dilakukan pengujian atas Hipotesis Nol (H_0) untuk membuktikan apakah Hipotesis Nol (H_0) tersebut ditolak. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidak akuratan sebesar (α) = 5% = 0.05 maka:
   a. Jika nilai T-statistik lebih kecil dari nilai T-tabel (T-statistik < T-tabel), maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

b. Jika nilai T-statistik lebih besar atau sama dengan nilai T-tabel (T-statistik > T-tabel), maka H_0 ditolak dan H_A gagal ditolak.

Kriteria penilaian dari out *Partial Least Square* (PLS) yang diperlukan untuk melakukan penafsiran dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kriteria Penilaian *Partial Least Square* (PLS)

Uji Model	Output	Kriteria
Outer Model (Uji Indikator)	*Convergent Validity*	Nilai *Loading factor* minimal 0.5 sudah dianggap cukup
	Discriminant Validity	Nilai korelasi *Cross Loading* dengan variabel harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel yang lain >0.7
	Average Variance Extracted (AVE)	Nilai akar kuadrat AVE setiap variabel lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya
	Composite Reliability	Nilai *Composite Reliability* yang baik apabila memiliki nilai > 0.7
Inner Model (Uji Hipotesis)	R^2 untuk Variabel Dependen	Nilai R^2 jika hasilnya mendekati 1 berarti kemampuan untuk memprediksi variabel Dependen kuat dan sebaliknya.
	Koefisien parameter dan T-Statistik	Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan yang dapat diperoleh dengan *bootstrapping*

2.5.3.2. *Path Coefficient*

Path Coefficient adalah suatu model analisis jalur yang secara sistematis untuk membandingkan yang bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015).

2.5.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menunjukan persentase *varians* dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Latan & Ghozali, 2015). R^2 merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa besar kemampuan model

yang digunakan di dalam penelitian untuk menerangkan variasi dari dependen. Nilai R^2 antara nol sampai dengan 1, jika hasil R^2 mendekati 1 berarti kemampuan variabel – variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya.

2.5.3.4. Uji *Goodnes of Fit* (GoF)

Evaluasi Goodness of Fit (GoF) dilakukan guna untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) dan disamping itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model (Ghozali & Latan, 2015). Dengan kata lain uji GoF dilakukan untuk menguji kecocokan model atau kesesuaian model dengan data penelitian yang kita miliki. Nilai GoF diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality index* dimana dalam PLS nilai ini sama dengan nilai AVE, yang dikalikan dengan akar nilai rata-rata (*R-square*). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpertasi nilai yaitu 0-0.25 (GoF kecil). 0.26-0.35 (GoF moderat), dan 0.36-1 (GoF besar) (Yamin & Kurniawan, 2011).

Rumus untuk menghitung nilai GoF antara lain :

$$GoF = \sqrt{\overline{AVE} \times \overline{R^2}}$$

Keterangan: AVE = nilai rata-rata *communality index*

R^2 = nilai rata-rata *R-square*

2.5.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penilitian ini dilakukan dengan dalam dua tahap, yaitu melakukan analisis data tanpa efek moderasi dan dengan efek

moderasi. Ini dilakukan agar didapatkan perbedaan antara model tanpa moderasi dan dengan efek moderasi, yang nantinya akan didapatkan bagaimana perbedaannya. Hipotesis akan diterima jika nilai $p<0.05$ dan tingkat kepercayaannya 5%. Nilai koefisien jalur digunakan untuk menentukan arah hubungan koefisien korelasi, jika positif akan menunjukkan bahwa ada hubungan positif diantara konstruk dan juga sebaliknya (Ghozali, 2013).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil dan analisis dari penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM.

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara google from dan langsung oleh peneliti kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi online pada UMKM di wilayah Yogyakarta, Jawa tengah, dan Lampung. Berikut pada Tabel 4.1 disajikan mengenai data detail penyebaran kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	180	100
Kuesioner yang kembali	159	88.3
Kuesioner yang tidak kembali	21	11.67
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	-	-
Kuesioner yang memenuhi syarat untuk diuji lebih lanjut	**159**	**88.3**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang telah disebar dalam penelitian ini yaitu sebanyak 180 kuesioner, tetapi kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis yaitu sebanyak 159 kuesioner, dengan tingkat *useable response rate* sebesar 88.3 %. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 (11.67%) dan tidak ada

kuesioner yang tidak memenuhi syarat dalam penelitian ini. Jadi, kuesioner yang dapat dilanjutkan untuk analisis data berikutnya sebanyak 159 (88.3) kuesioner.

4.2. Deskripsi Data Responden

Deskripsi data ini menggambarkan beberapa kondisi responden yang ditampilkan secara statistik. Data deskripsi responden memberikan beberapa informasi secara sederhana tentang keadaan responden yang dijadikan objek penelitian. Responden pada penelitian ini digambarkan melalui jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, usia usaha, perdapatan usaha, serta lokasi usaha transaksi online UMKM.

4.2.1. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

Berikut ini adalah deskripsi responden menurut jenis kelamin yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Komposisi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	91	57.2
Wanita	68	42.8
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 91 responden (67.2%), dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 68 responden (42.8%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden didominasi berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 91 responden (67.2%).

4.2.2. Deskripsi Responden Menurut Kelompok Usia

Berikut ini adalah deskripsi responden menurut kelompok usia diilustrasikan Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Komposisi Responden Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 tahun	1	0.63
20 - 29 tahun	10	6.3
30 - 39 tahun	34	21.4
40 - 49 tahun	94	59.1
50 - 59 tahun	19	11.94
> 60 tahun	1	0.63
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka kelompok usia responden menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 40-49 tahun yaitu sebanyak 94 responden (59.1%), dilanjutkan dengan umur antara 30-39 tahun sebanyak 34 responden (31.4%), dilanjutkan berumur antara 50-59 tahun sebanyak 19 responden (11.94%), dilanjutkan responden yang berumur 20-29 tahun sebanyak 10 responden (6.3%) serta responden yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 60 tahun masing-masing sebanyak 1 responden (0.63%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berumur antara 40-49 tahun yaitu sebanyak 94 responden (59.1%).

4.2.3. Deskripsi Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Berikut ini adalah deskripsi responden menurut pendidikan terakhir seperti yang disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Komposisi Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD atau yang sederajat	18	11.33
SMP atau yang sederajat	66	41.5
SMA atau yang sederajat	54	33.97
Perguruan Tinggi	21	13.2
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, maka tabel di atas menujukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh tingkat pendidikan SD atau yang sederajat yaitu sebanyak 18 responden (11.33%), responden menempuh tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 66 responden (41.5%), responden menempuh tingkat pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 54 responden (33.97%) dan responden menempuh tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 21 responden (13.2%) dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden menempuh tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 66 responden (41.5%).

4.2.4. Deskripsi Responden Menurut Jenis Usaha

Komposisi responden menurut jenis usaha menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendeskripsikan keadaan responden dalam penelitian ini. Berikut ditampilkan komposisi responden menurut jenis usaha yang diilustrasikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Komposisi Responden Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Usaha Kuliner	18	11.33
Usaha Dagang	108	67.92
Usaha Industri	21	13.2
Usaha Otomotif	3	1.89
Usaha Jasa	6	3.76
Usaha lain – lain	3	1.89
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan jenis usaha, maka tabel di atas menujukkan bahwa responden yang menjalankan usaha dagang sebanyak 108 responden (67.92%), jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dari keseluluhan responden dalam penelitian ini. Di sisi lain, responden yang menjalankan usaha dibidang industri sebanyak 21 responden (13.2%) terbanyak kedua dari jumlah seluruh responden, dan responden yang menjalankan usaha kuliner sebanyak 18 responden (11.33) terbanyak ketiga dari jumlah seluluh responden. Sedangkan responden yang menjalankan usaha otomotif, usaha jasa, dan usaha lain-lain masing-masing sebanyak 3 responden (1.89%), 6 responden (3.76) dan 3 responden (1.89%) menepati peringkat terendah dalam penelitian ini.

4.2.5. Deskripsi Responden Menurut Usia Usaha

Berikut ini adalah deskripsi responden menurut usia usaha seperti yang disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Komposisi Responden Menurut Usia Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
< 5 Tahun	56	35.2
6 - 9 Tahun	55	34.60
10 – 14 Tahun	46	28.94
> 15 Tahun	2	1.26
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan usia usaha, maka tabel di atas menujukkan bahwa responden yang usia usahanya kurang dari 5 tahun sebanyak 56 responden (35.2%), dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dari keseluluhan responden dalam penelitian ini. Di sisi lain, responden yang usia usahanya 6-9 tahun sebanyak 55 responden (34.60%) terbanyak kedua dari jumlah seluruh responden, dan responden yang usia usahanya 10-14 tahun sebanyak 46 responden (28.94) terbanyak ketiga dari jumlah seluluh responden. Sedangkan responden yang usia usahanya lebih dari 15 tahun sebanyak 2 responden (1.26%) menepati peringkat terendah dalam penelitian ini.

4.2.6. Deskripsi Responden Menurut Pendapatan Usaha

Berikut ini adalah deskripsi responden menurut pendapatan usaha diilustrasikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Komposisi Responden Menurut Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp.5.000.000,-	118	74.21
Rp 5.000.001 s/d Rp. 10.000.000,-	23	14.47
Rp. 10.000.001 s/d Rp. 20.000.000,-	12	7.54
Rp. 20.000.001 s/d Rp. 35.000.000,-	3	1.89
> Rp. 35.000.000,-	3	1.89
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan pendapatan usaha, maka tabel di atas menujukkan bahwa responden yang pendapatan usahanya kurang dari Rp.5.000.000,- sebanyak 118 responden (74.21%), dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dari keseluluhan responden dalam penelitian ini. Di sisi lain, responden yang pendapatan usahanya Rp 5.000.001 s/d Rp. 10.000.000,- sebanyak 23 responden (14.47%) terbanyak kedua dari jumlah seluruh responden, dan responden yang

pendapatan usahanya Rp. 10.000.001 s/d Rp. 20.000.000,- sebanyak 12 responden (7.54) terbanyak ketiga dari jumlah seluluh responden. Sedangkan responden yang pendapatan usahanya Rp. 20.000.001 s/d Rp. 35.000.000,- dan lebih dari Rp. 35.000.000,- masing-masing sebanyak 3 responden (1.89%) dan 3 responden (1.89%) menepati peringkat terendah dalam penelitian ini.

4.2.7. Deskripsi Responden Menurut Lokasi Usaha

Berikut ini adalah deskripsi responden menurut lokasi usaha seperti yang disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Komposisi Responden Menurut Lokasi Usaha

Lokasi Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Yogyakarta	43	27.04
Jawa Tengah	46	28.93
Lampung	70	44.03
Total	**159**	**100**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan lokasi usaha, maka tabel di atas menujukkan bahwa responden yang lokasi usahanya di daerah Lampung sebanyak 70 responden (44.03%), dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar dari keseluluhan responden dalam penelitian ini. Di sisi lain, responden yang lokasi usahanya di daerah Jawa Tengah sebanyak 46 responden (28.93%) terbanyak kedua dari jumlah seluruh responden, dan responden yang lokasi usahanya di daerah Yogyakarta sebanyak 43 responden (27.04) merupakan lokasi usaha terendah dalam penelitian ini.

4.3. Analisis *Inferensial*

Analisis dilakukan dengan pendekatan dengan metode *Structural Equation Modelling (SEM)* berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS 3.0. PLS merupakan alternatif olah data dari pendekatan SEM yang berbasis *covariance* menjadi berbasis *variant*, dan PLS merupakan jenis analisis SEM yang berbasis komponen dengan sifat konstruk formatif (Weiber & Daniel, 2014).

4.3.1. Merancang Model Struktural Variabel Konstruk

Uji model penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya kesesuaian model yang dibangun. Model penelitian akan menggambarkan kesesuaian hubungan antara variabel dalam penelitian. Model dalam penelitian ini memiliki 5 variabel yang terdiri dari 3 variabel konstruk independen yaitu kebijakan pajak (KjP), Pengetahuan Pajak (PP), Sanksi Pajak (SP), dan 1 variabel moderasi yaitu insentif pajak (IP), serta 1 variabel konstruk dependen yaitu kepatuhan pajak (KtP). Hasil pengujian dengan menggunakan SmartPLS 3.0 telah memberikan hasil perhitungan yang menunjukkan kriteria yang digunakan.

4.3.2. Analisa Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dalam modal struktural harus dilakukan pengujian model pengukuran terlebih dahulu untuk memverifikasi indikator serta variabel laten (Haryono, 2017). *Outer model* sering juga disebut *outer relation* atau

measurement model, yang mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel laten.

Pengujian ini meliputi pengujian validitas konstruk (*convergent validity*) dan pengujian reliabilitas konstruk. Untuk menguji validitas dan reliabilitas dapat digunakan dengan merancang sebuah model pengukuran atau *outer model*. Menurut Wiyono (2011), *outer model* (model pengukuran) pada prinsipnya menguji indikator terhadap variabel laten, atau mengukur seberapa jauh indikator itu dapat menjelaskan variabel latennya. Analisa *outer model* ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (*valid* dan *reliabel*). Analisa ini melakukan penspesifikasian hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Analisa *outer model* dapat dilihat dari uji sebagai berikut ini.

4.3.2.1. Uji Validitas

Tujuan melakukan uji validitas adalah mengetahui seberapa jauh validitas data penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan. Esensi dari validitas adalah akurasi. Instrumen dapat dikatakan valid, apabila instrumen tersebut dapat mengukur yang seharusnya diukur (Ghozali & Latan, 2015). Menurut Abdillah dan Hartono (2015), uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran dalam suatu konstuk seharusnya memiliki korelasi tinggi. Apabila AVE lebih dari 0.5 dan seluruh instrumen variabel memiliki faktor *loading* lebih dari 0.7. Namun untuk penelitian tahap awal dari

pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup valid (Latan & Ghozali, 2015).

Uji validitas diskriminan mempunyai hubungan dengan prinsip, untuk pengukur-pengukur konstruk yang berbeda tidak mempunyai korelasi yang tinggi (Latan & Ghozali, 2015). Apabila nilai akar AVE dan korelasi variabel laten memiliki niali dari akar AVE > korelasi variabel laten dan *cross loading* dari konstruk akan dituju > nilai *cross loading* dari konstruk lainnya, maka memenuhi syarat uji validitas diskriminan atau indikator dalam penelitian ini dapat dianggap valid (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian validitas dalam penelitian ini terlebih dahulu melihat uji konvergen, yaitu melihat nilai *loading* dan nilai AVE. Untuk lebih jelasnya, hasil uji validitas konvergen dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 4.9. Item *Loading* dan AVE pada Model Awal

No	Variabel	Kode	Loading	AVE
1	Kebijakan Pajak (KjP)	KjP.1	0.926	0.616
2		KjP.2	0.928	
3		KjP.3	0.995	
4		KjP.4	0.899	
5		KjP.5	0.890	
6		KjP.6	0.907	
7		KjP.7	0.899	
8	Pengetahuan Pajak (PP)	PP.1	0.878	0.741
9		PP.2	0.909	
10		PP.3	0.914	
11		PP.4	0.906	
12		PP.5	0.887	
13		PP.6	0.851	
14		PP.7	0.919	
15		PP.8	0.869	
16		PP.9	0.878	

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tabel 4.9. Item *Loading* dan AVE pada Model Awal Lanjutan

No	Variabel	Kode	Loading
17	Sanksi Pajak (SP)	SP.1	0.895
18		SP.2	0.896
19		SP.3	0.912
20		SP.4	0.894
21		SP.5	0.901
22		SP.6	0.893
23		SP.7	-0.008
24	Insentif Pajak (IP)	IP.1	0.935
25		IP.2	0.965
26		IP.3	0.902
27		IP.4	0.020
28		IP.5	-0.010
29		IP.6	0.042
30	Kepauhan Pajak (KtP)	KtP.1	0.890
31		KtP.2	0.895
32		KtP.3	0.892
33		KtP.4	0.893
34		KtP.5	0.956
35		KtP.6	0.972
36		KtP.7	0.420

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa 31 item pertanyaan memiliki nilai lebih dari 0.5, dan nilai AVE lebih dari 0.5. Sedangkan 5 item pertanyaan memiliki nilai kurang dari 0.5, dan tidak memenuhi kriteria atau tidak valid, seperti item nilai SP.7, KtP.7, IP.4, IP.5, dan IP.6. Dengan demikian, dapat disimpulkan instrumen dalam penelitian ini belum valid seluruhnya. Agar dapat memenuhi kriteria uji validitas *konvergen*, maka harus menghapus item pertanyaan dari variabel yang memiliki nilai *loading* lebih kecil dari 0.5 dan nilai AVE lebih kecil 0.5, seperti item pertanyaan SP.7, KtP.7, IP.4, IP.5, dan IP.6 selanjutnya dihitung kembali menggunakan SmartPLS. Hasil perhitungan kembali uji validitas *konvergen* dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Item *Loading* dan AVE pada Model Akhir

No	Variabel	Kode	Loading	AVE
1	Kebijakan Pajak (KjP)	KjP.1	0.925	0.686
2		KjP.2	0.918	
3		KjP.3	0.993	
4		KjP.4	0.898	
5		KjP.5	0.892	
6		KjP.6	0.905	
7		KjP.7	0.895	
8	Pengetahuan Pajak (PP)	PP.1	0.877	0.742
9		PP.2	0.919	
10		PP.3	0.914	
11		PP.4	0.906	
12		PP.5	0.887	
13		PP.6	0.852	
14		PP.7	0.919	
15		PP.8	0.879	
16		PP.9	0.877	
17	Sanksi Pajak (SP)	SP.1	0.891	0.557
18		SP.2	0.897	
19		SP.3	0.912	
20		SP.4	0.891	
21		SP.5	0.901	
22		SP.6	0.896	
23	Insentif Pajak (IP)	IP.1	0.934	0.569
24		IP.2	0.965	
25		IP.3	0.901	
26	Kepatuhan Pajak (KtP)	KtP.1	0.891	0.630
27		KtP.2	0.894	
28		KtP.3	0.898	
29		KtP.4	0.891	
30		KtP.5	0.956	
31		KtP.6	0.977	

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10, seluruh item pertanyaan memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0.5 dan nilai AVE lebih dari 0.5. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dari variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria dari uji validitas *konvergen* dan valid. Selanjutnya, untuk melakukan uji validitas dapat dilakukan dengan uji diskriminan, yaitu melihat nilai *cross loading* konstruk yang akan dituju

dan korelasi variabel laten. Untuk lebih jelasnya, hasil uji validitas diskriminan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11.

4.11. *Cross Loading* pada Model Akhir

	KjP	PP	SP	KtP	IP
KjP.1	0,925	0,790	0,811	0,831	0,861
KjP.2	0,918	0,740	0,812	0,829	0,838
KjP.3	0,993	0,712	0,791	0,752	0,730
KjP.4	0,898	0,816	0,882	0,872	0,891
KjP.5	0,892	0,790	0,801	0,870	0,810
KjP.6	0,905	0,810	0,890	0,883	0,832
KjP.7	0,895	0,746	0,784	0,772	0,741
PP.1	0,819	0,877	0,807	0,802	0,701
PP.2	0,783	0,919	0,845	0,806	0,809
PP.3	0,801	0,914	0,817	0,815	0,809
PP.4	0,767	0,906	0,750	0,761	0,707
PP.5	0,842	0,887	0,861	0,871	0,875
PP.6	0,801	0,852	0,732	0,843	0,733
PP.7	0,808	0,919	0,854	0,814	0,818
PP.8	0,808	0,879	0,778	0,807	0,746
PP.9	0,815	0,877	0,819	0,815	0,823
SP.1	0,798	0,715	0,891	0,758	0,731
SP.2	0,817	0,695	0,897	0,870	0,891
SP.3	0,468	0,427	0,912	0,466	0,406
SP.4	0,694	0,803	0,891	0,817	0,831
SP.5	0,707	0,748	0,901	0,777	0,768
SP.6	0,735	0,771	0,896	0,819	0,802

Sumber : Data primer diolah, 2021

4.11. *Cross Loading* pada Model Akhir Lanjutan

	KjP	PP	SP	KtP	IP
KtP.1	0,781	0,830	0,719	0,891	0,733
KtP.2	0,785	0,723	0,758	0,894	0,764
KtP.3	0,812	0,784	0,795	0,898	0,752
KtP.4	0,806	0,816	0,860	0,891	0,882
KtP.5	0,798	0,717	0,794	0,956	0,732
KtP.6	0,836	0,789	0,780	0,977	0,791
IP.1	0,798	0,807	0,790	0,789	0,934
IP.2	0,789	0,731	0,779	0,761	0,965
IP.3	0,738	0,778	0,786	0,752	0,901

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat korelasi dari item mempunyai nilai lebih besar dari pada dengan korelasi item tersebut terhadap item lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan instrumen dalam penelitian ini valid.

Tabel 4. 12. Akar Kuadrat AVE dan Korelasi Antar Variabel

	KjP	PP	SP	KtP	IP
KjP	0.998				
PP	0.976	0.982			
SP	0.875	0.873	0.947		
KtP	0.872	0.770	0.740	0.894	
IP	0.771	0.667	0.730	0.760	0.816

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai Akar kuadrat AVE dari seluruh variabel lebih besar dari pada korelasi antar variabel lain. Sebagai contoh variabel KjP memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0.998 lebih besar dari korelasi antar variabel lain, seperti PP (0.976), SP (0.875), KtP (0.872), dan IP (0.771). Dengan demikian, penelitian ini memenuhi kriteria uji validitas diskriminan atau dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini valid.

4.3.2.2. Uji Reliabilitas dengan *Composite Reliability*

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner akan dikatakan reliabel jika jawaban dari kuisioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sehingga dikatakan reliabel jika suatu keadaan dimana instrumen penelitian tersebut akan tetap menghasilkan data yang sama walaupun disebarkan pada sampel yang berbeda-beda dan dalam waktu yang berbeda pula.

Uji reliabilitas dilakukan menentukan *composite reliability*, apabila nilai *composite reliability* > 0.8 dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliabel dan > 0.6 dikatakan cukup *reliable*. Uji reliabilitas dilihat dari nilai konstruk *composite realibility* dan *cronbach's alpha.* Apabila suatu konstruk mempunyai nilai *composite realibility* di atas 0.7 dan *cronbach's alpha* di atas 0.6, maka konstruk dinyatakan *realiable* (Ghozali & Latan, 2015). Adapun hasil uji reliabilitas dengan *composite reliability* dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Hasil *Outer Model*

Variabel	*Composite Reliability*	R^2	Cronbach's Alpha
Insentif Pajak (IP)	0.802		0.663
Kebijakan Pajak (Kjp)	0.937		0.919
Pengetahuan Pajak (PP)	0.963		0.956
Sanksi Pajak (SP)	0.880		0.824
Kepatuhan Pajak(Ktp)	0.920	**0.982**	0,895

Sumber : Data primer diolah, 2021

Dari hasil pengukuran di atas, seluruh variabel laten memiliki nilai *composite reliability* > 0.7 dan *cronbach's alpha* > 0.6, artinya seluruh variabel laten indepeden sesuai dan layak untuk dijadikan variabel yang diuji untuk

mengetahui pengaruhnya pada variabel laten dependen yaitu kepatuhan pajak. Maka seluruh variabel laten sesuai dan layak untuk analisis data selanjutnya.

4.3.3. Analisa Model Struktural (*Inner Model*)

Jika kriteria pengujian model pengukuran *(inner model)* yang sebelumnya telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji model struktural *(inner model)*. Penelitian ini menguji *inner model* dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) dan Uji *Goodness of Fit* (GoF).

4.3.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, maka variabel independen mampu menerangkan variabel dependen tidak terbatas (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini untuk nilai R^2 (Lihat Tabel.4.13) adalah sebesar 0.982. Angka hasil R^2 ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel kebijakan pajak (KjP), pengetahuan pajak (PP), sanksi pajak (SP), kepatuhan pajak (KtP), dan insentif pajak (IP) memberi nilai sebesar 0.982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel laten dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel laten independen sebesar 98.2 %, sedangkan 1.8 % dijelaskan oleh variabel yang tidak/belum masuk dalam penelitian ini.

4.3.3.2. Uji *Goodnes of Fit* (GoF)

Uji *Goodnessof Fit* (GoF) dihitung dari akar kuadrat nilai *average* AVE dan *average R-Square*, Tabel 4.14 menyajikan nilai AVE dan *Adjusted* R-Square.

Tabel 4.14. Nilai AVE dan *Adjusted* R-Square

Variabel	*Adjusted* R Square	AVE
Kebijakan Pajak (KjP)		0.686
Pengetahuan Pajak (PP)		0.742
Sanksi Pajak (SP)		0.557
Insentif Pajak (IP)		0.569
Kepatuhan Pajak(Ktp)	0.982	0.630
Average	**0.982**	**0.636**

Sumber : Data primer diolah, 2021

Dengan perhitungan GoF sebagai berikut :

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$= \sqrt{0.636 \times 0.982}$$

$$= 0.790$$

Dari hasil perhitungan tabel di atas diperoleh nilai GoF sebesar 0.790, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki *goodnes of fit* yang besar. Sehingga semakin besar nilai GoF, maka model dalam penelitian semakin cocok atau sesuai dengan data penelitian yang kita miliki dan pengujian hipotesis dapat dilakukan.

4.3.4. Analisis Jalur

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian yang dihasilkan dari *ouput* PLS. *Output* PLS sendiri, yang merupakan sebuah estimasi variabel laten yang merupakan *linear agregat* dari adanya indikator. Dalam analisis ini akan dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode *resampling bootstraping*, dan uji yang digunakan adalah statistik T atau uji T.

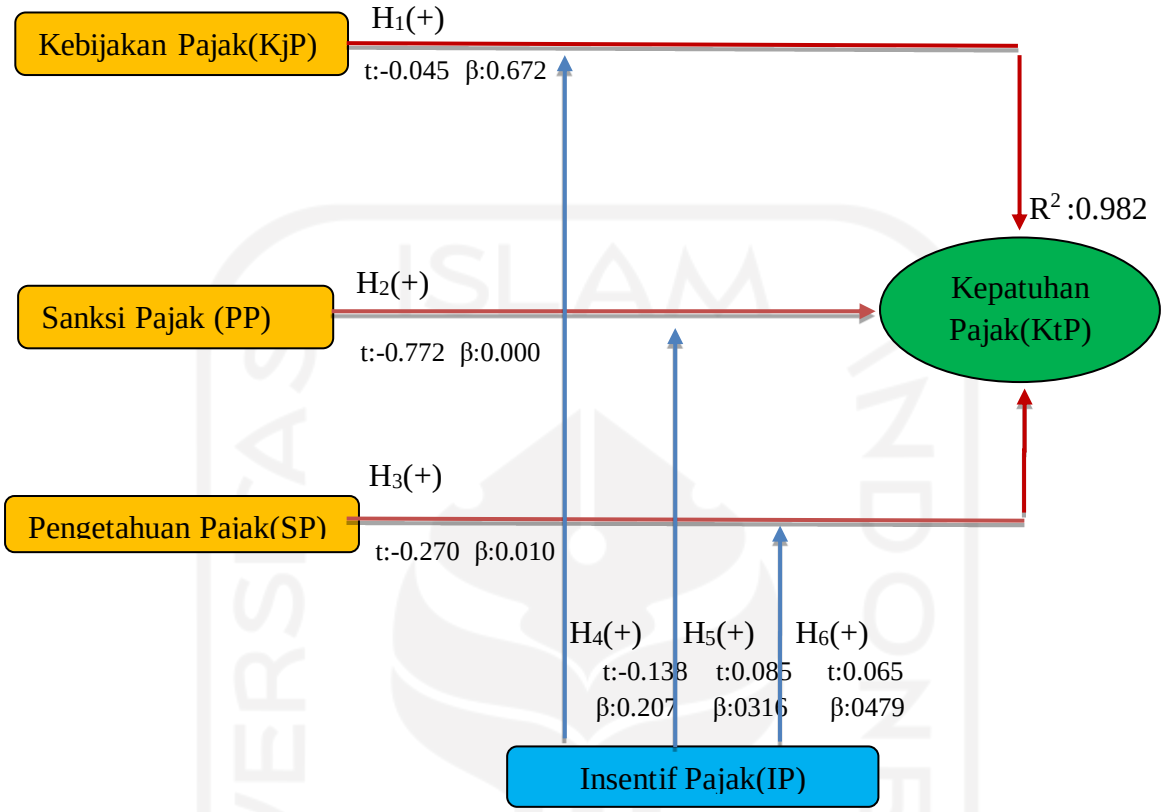
Pada umumnya penelitian yang dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% (Ghozali, 2013). Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat dari koefisien jalur yang ada dengan membandingkan

antara nilai probabilitas 0.05 dengan nilai probabilitas Sig, dan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

1) Jika nilai probabilitas atau nilai T 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0.05 ≤ Sig) maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
2) Jika nilai probabilitas atau nilai T 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0.05 ≥ Sig) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

4.3.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dengan melakukan analisis data tanpa efek moderasi dan tahap ke dua dengan efek moderasi. Ini dilakukan agar didapatkan perbedaan antara model tanpa moderasi dan dengan efek moderasi, yang nantinya akan didapatkan bagaimana perbedaannya. Berikut hasil pengujian dari model penelitian dijelaskan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Hasil Model Penelitian

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, dan hipotesis akan diterima jika nilai p < 0.05. Hasil perhitungan dengan SmartPLS 3.0 untuk menguji hipotesis penelitian dijelaskan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Hipotesis

	Keterangan	***Path-coefficient***	**P Values**	**Ideal**	**Hasil**
$H_1(+)$	KjP -> KtP	-0.045	0.672	<0.05	Tidak Terdukung
$H_2(+)$	PP -> KtP	0.772	0.000	<0.05	Terdukung
$H_3(+)$	SP -> KtP	0.270	0.010	<0.05	Terdukung
$H_4(+)$	IP* KjP -> KtP	-0.138	0.207	<0.05	Tidak Terdukung
$H_5(+)$	IP* PP -> KtP	0.085	0.316	<0.05	Tidak Terdukung
$H_6(+)$	IP* SP -> KtP	0.065	0.479	<0.05	Tidak Terdukung

Sumber : Data primer diolah, 2021

4.3.5.1. Tahap Pertama

Pada tahap pertama ini dilakukan analisis data tanpa adanya efek moderasi pada model penelitian. Dilakukan dengan menghitung langsung pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen untuk menguji hipotesis penelitian **H_1** sampai dengan **H_3**.

H_1: Kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis pertama (H_1) yang menguji hubungan antara kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien jalur *(path coefficient)* kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak ß (beta) = -0.045 (lebih kecil dari 0.1) dengan p-value = 0.672 (Lihat Tabel 4.15) yang menunjukkan signifikan di atas nilai syarat maksimum 0.05. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**.

H_2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuha pajak

Hipotesis kedua (H_2) yang menguji hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien jalur *(path coefficient)* pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak ß (beta) = 0.772 (lebih besar dari 0.1) dengan p-value = 0.000 (Lihat Tabel 4.15) yang menunjukkan signifikan di bawah nilai syarat maksimum 0.05. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **Terdukung** atau **Diterima**.

H_3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis ketiga (H_3) yang menguji hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien jalur *(path coefficient)* sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak ß (beta) = 0.270 (lebih besar dari 0.1) dengan p-value = 0.010 (Lihat Tabel 4.15) yang menunjukkan signifikan di bawah nilai syarat maksimum 0.05. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini **Terdukung** atau **Diterima**.

4.3.5.2. Tahap Kedua

Pada tahap kedua ini dilakukan analisis data dengan efek moderasi pada model penelitian. Dilakukan dengan menghitung pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen dengan moderasi insentif pajak untuk menguji hipotesis penelitian **H_4** sampai dengan **H_6**. Hasil *Adjusted R-square* dengan moderasi insentif pajak (IP) ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel kebijakan pajak (KjP), pengetahuan pajak (PP), sanksi pajak (SP), terhadap kepatuhan pajak (KtP) memberi nilai sebesar 0.982 (Lihat Tabel.4.16).

H_4: Insentif pajak berpengaruh atas, peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis keempat (H_4) yang menguji hubungan antara kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan di moderasi oleh insentif pajak, menunjukkan bahwa moderasi insentif pajak pada peranan kebijakan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien jalur *(path coefficient)* insentif pajak pada kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak ß (beta) = -0.138 (lebih kecil

dari 0.1) dengan p-value = 0.207 (Lihat Tabel 4.15) yang menunjukkan di atas nilai syarat signifikan sebesar maksimum 0.05. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**.

H_5: Insentif pajak berpengaruh atas, peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis kelima (H_5) yang menguji hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan di moderasi oleh insentif pajak, menunjukkan bahwa moderasi insentif pajak pada pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien jalur *(path coefficient)* insentif pajak pada pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak ß (beta) = 0.085 (lebih kecil dari 0.1) dengan p-value = 0.316 (Lihat Tabel 4.15) yang menunjukkan signifikan diatas nilai syarat maksimum 0.05. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**.

H_6: Insentif pajak berpengaruh atas, peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis keenam (H_6) yang menguji hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan di moderasi oleh insentif pajak, menunjukkan bahwa moderasi insentif pajak pada sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien jalur *(path coefficient)* insentif pajak pada sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak ß (beta) = 0.065 (lebih kecil dari 0.1) dengan p-value = 0.479 (Lihat Tabel 4.15) yang menunjukkan signifikan di atas nilai syarat maksimum 0.05. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**.

4.3.6. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil analisis SmartPLS terhadap data penelitian untuk *Adjusted R-Square* disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Nilai *Adjusted R-Square*

		R Square	Adjusted R-Square
Tanpa Moderasi	Y	0.982	0.982
Dengan Moderasi	Y	0.983	0.982

Dari tabel *Adjusted R-Square* di atas dapat diketahui bahwa nilai sebelum adanya moderasi adalah sebesar 0.982 dan setelah dilakukan pemoderasian yaitu 0.982. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak ada peningkatan pengaruh moderasi variabel insentif pajak (IP) atas variabel kebijakan pajak (KjP), pengetahuan pajak (PP), dan sanksi pajak (SP) terhadap kepatuhan pajak (KtP) sebesar 0.000. Dari hasil penelitian yang diujikan tersebut, masing-masing hipotesis dapat dibahas pada bagian di bawah ini.

4.3.6.1. Kebijakan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis pertama (H_1) menguji hubungan antara kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**.

Alasan tidak diterimanya hipotesis pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori secara umum menyatakan bahwa kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan. Kebijakan pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan pajak, semakin baik kebijakan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak.

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang pada transaksi online UMKM.

Namun, kebijakan pajak merupakan faktor ekternal atau faktor luar untuk mempengaruhi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tetapi dalam prakteknya terkadang banyak faktor lain (faktor internal) yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan lain sebagainnya. Sehingga kebijakan pajak dalam penelitian ini tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak secara langsung berdampak terhadap kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak tidak merasakan dampak secara langsung, kebijakan yang mendukung atau tidak mendukung kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan di masa pandemi, sehingga banyak kebijakan pajak yang berubah-ubah dalam waktu yang cepat untuk meyesuaiankan kondisi usaha para wajib pajak. Sehingga pengambilan kebijakan dengan waktu yang singkat cendrung menghasilakn kebijakan yang kurang tepat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak meningkatkan kepatuhan pajak. Hal tersebut, dikarenakan kemungkinan banyaknya wajib pajak yang kurang memahami aturan atau kebijakan pajak yang ditentukan, terutama kebijakan pajak di masa pandemi.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) yang meneliti tentang pengaruh *sunset policy, tax amnesty,* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kebijakan *Sunset policy* dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi aspek-aspek formal kewajiban perpajakannya.

Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa jika kebijakan pajak sebaik apapun jika diterapkan pada situasi sulit, seperti di masa pandemi saat ini, maka akan menghasilkan kebijakan yang kurang tepat karena pembuatan kebijakan dilakukan dengan waktu yang singkat untuk jangka waktu tertentu atau pendek. Dengan semakin banyaknya kebijakan pajak yang di berikan pemerintah di masa pandemi, maka wajib pajak akan semakin sulit memahami kebijakan pajak dalam waktu yang singkat khususnya wajib pajak para pelaku UMKM.

4.3.6.2. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua (H_2) menguji hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **Terdukung** atau **Diterima**. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak pajak pada transaksi online UMKM.

Wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mereka tidak akan ragu terhadap perkara mengenai unsur pajak yang bersifat memaksa dan kontraprestasi. Mereka dengan sadar diri, akan patuh membayar pajak melalui sistem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut dapat dirasakan meskipun secara tidak langsung.

Seseorang yang tidak berpengetahuan tentang pajak, akan menilai semua fasilitas yang telah mereka gunakan di negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tanpa mereka berpikir dari mana dana untuk mewujudkan semua fasilitas itu. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dengan suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Rachmawati, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmawati (2019) menyatakaan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak cenderung taat membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini di dukung dengan penelitian oleh Rahayu (2017) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah jika wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak yang baik, maka wajib pajak akan mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak, serta fungsi pajak bagi negara. Dengan demikian, maka wajib pajak akan patuh membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya pendapatan di sektor penerimaan pajak. Wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan yang baik maka akan mencari celah peratulan perpajakan untuk mengurangi beban pajak usahanya, bahkan wajib pajak akan menempung jarul peradilan pajak bila terjadi sengkata pajak, di karenakan wajib pajak kurang puas dengan jumlah pajak yang harus dibayar dalam surat tagihan pajak yang dikeluarkan direktorat jenderal pajak (DJP).

4.3.6.3. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) menguji hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa saknsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini **Terdukung** atau **Diterima**. Sanksi adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk terciptanya kepatuhan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM. Sanksi Pajak berpengaruh positif karena wajib pajak akan berpikir bila tidak membayar pajak akan mendapat sanksi pajak berupa denda, yang menyebabkan pajak pendapatan usaha yang dimiliki wajib pajak semakin akan bertambah. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Subarkah dan Maya (2017) menemukan bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hal ini di dukung dengan penelitian Rahayu (2017) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Implikasi dari hasil penelitian bahwa jika sanksi pajak diterapkan dengan tegas, maka wajib pajak akan patuh dan menghindari sanksi pajak berupa denda

yang mengakibatkan wajib pajak harus membayar pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian wajib pajak akan memayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan agar tidak terkena sanksi pajak. Dengan wajib pajak yang patuh dan membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan agar meningkatkan kepatuhan pajak khususnya wajib pajak para pelaku UMKM.

4.3.6.4. Insentif Pajak Berpengaruh atas, Peranan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini terkait moderasi insentif pajak atas, peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil masih tetap sama atau tidak meningkat.

Alasan tidak diterimanya hipotesis keempat dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori secara umum menyatakan bahwa moderasi insentif pajak atas, peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak didefinisikan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Pratama, 2018).

Insentif pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak karena insentif pajak pengurangan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan, dengan pengurangan besarnya pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak merupakan faktor ekternal dalam mempengaruhi untuk

meningkatkan kepatuhan pajak, Dalam penelitian ini insentif pajak belum mampu memoderasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Suryadi, 2019). Namun dalam prakteknya, terkadang banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak terutama faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan lain sebagainnya. Sehingga insentif pajak dalam penelitian ini belum mampu memoderasi pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil masih tetap sama atau tidak meningkat. Keadaan ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah dan Latifah (2017) yaitu kebijakan *tax amnesty* atau pengurangan pajak di bidang perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak, tetapi dalam penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) *tax amnesty* atau pengurangan pajak dijadikan variabel independen.

Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa meskipun insentif pajak belum mampu memoderasi hubungan atas peranan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak, wajib pajak tetap harus memperhatikan kebijakan insentif pajak yang akan mengurangi beban pajaknya. Hal ini di karenakan pengambilan kebijakan insentif pajak dengan waktu yang singkat di masa pandemi ini, maka akan menghasilakan kebijakan insentif pajak yang kurang tepat dan tidak akan memberi dampak yang banyak bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya wajib pajak para pelaku UMKM.

4.3.6.5. Insentif Pajak Berpengaruh atas, Peranan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kelima (H_5) dalam penelitian ini terkait moderasi insentif pajak atas, peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil masih tetap sama atau tidak meningkat.

Alasan tidak diterimanya hipotesis kelima dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori secara umum menyatakan bahwa moderasi insentif pajak atas, peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak didefinisikan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Prasetya & Gayatri, 2017).

Wajib pajak harus mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, agar beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat berkurang. Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi suatu hal yang harus diketahui wajib pajak, sehingga insentif pajak akan mempengaruhi pengetahuan wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya melalui insentif. Dengan beban pajak yang kecil maka wajib pajak akan mudah membayar pajaknya. Insentif pajak merupakan faktor ekternal dalam mempengaruhi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Dalam penelitian ini insentif pajak belum mampu memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rumiyatun & Wardani, 2017). Namun dalam prakteknya terkadang banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak terutama faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan lain sebagainnya. Sehingga insentif pajak dalam penelitian ini belum mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil masih tetap sama atau tidak meningkat. Keadaan ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah dan Latifah (2017) yaitu kebijakan *tax amnesty* atau pengurangan pajak di bidang perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak, tetapi dalam penelitian Alfiyah dan Latifah (2017) *tax amnesty* atau pengurangan pajak dijadikan variabel indipenden.

Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa walaupun insentif pajak belum mampu memoderasi hubungan antara peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, wajib pajak tetap harus mengetahui berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini karenakan dengan wajib pajak mengetahui berbagai macam insentif pajak yang di berikan pemerintah, maka wajib pajak akan bisa mengurangi beban pajak. Dengan beban pajak berkurang, maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak khususnya wajib pajak para pelaku UMKM.

4.3.6.6. Insentif Pajak Berpengaruh atas, Peranan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis keenam (H_6) dalam penelitian ini terkait moderasi insentif pajak atas, peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini **Tidak Terdukung** atau **Tidak Diterima**. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak belum mampu moderasi peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil masih tetap sama atau tidak meningkat.

Alasan tidak diterimanya hipotesis keenam dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori secara umum menyatakan bahwa moderasi insentif pajak atas, peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak didefinisikan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Prasetya & Gayatri, 2017). Dengan wajib pajak mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan pemerintah. Diharapkan agar wajib pajak memanfaatkan insentif yang diberikan untuk pengurangan pajaknya, dan tidak melanggar peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk melanggang ketentuan dibidang perpajakan untuk pengurangan jumlah yang dibayarkan (Suhendri, 2018). Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi suatu cara agar wajib pajak bisa mengurangkan beban pajak tanpa harus

melanggar peraturan untuk mengurangi beban pajak yang terhutang bagi wajib pajak, sehingga insentif pajak akan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Insentif pajak merupakan faktor ekternal dalam mempengaruhi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini insentif pajak belum mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Sari, 2013). Namun dalam prakteknya terkadang banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak terutama faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan lain sebagainnya. Sehingga kebijakan insentif pajak dalam penelitian ini belum mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa insentif pajak belum mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan hasil masih tetap sama atau tidak meningkat. Keadaan ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah dan Latifah (2017) yaitu kebijakan *tax amnesty* atau pengurangan pajak di bidang perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak.

Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa walaupun insentif pajak belum mampu memoderasi hubungan antara peranan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, wajib pajak tetap harus mengetahui berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk mengurangi beban pajaknya. Dengan wajib pajak mengetahui berbagai insentif pajak atau mengetahui tentang peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak menghindari sanksi pajak untuk mengurangi beban pajaknya, sehingga tidak di kenakan sanksi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan guna mengetahui dan menguji analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM yang ada di provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM yang ada di provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung. Adapun total responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 159 responden. Berdasarkan dari hasil analisis, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan penelitian ini variabel kebijakan pajak, diketahui bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan pajak yang baik tidak mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM.
2. Pengetahuan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin wajib pajak berpengetahuan tentang pajak, maka semakin mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM.

3. Sanksi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tegas sanksi pajak, maka semakin mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM.
4. Moderasi insentif pajak atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun banyak insentif pajak, namun tidak berdampak untuk memoderasi peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM.

5.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Sebagai kontribusi dan implikasi bagi kedepannya, diharapkan melalui penelitian ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru atau sebagai tambahan yang relevan bagi para akademisi kedepannya yang tertarik melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengusaha dan khususnya UMKM yang berada di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung kedepannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensial untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi dalam mambayar pajak transaksi online pada UMKM.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut adalah keterbatas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif pada seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung. Pada penelitian ini hanya dilakakukan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM bersedia mengisi kuesioner.
2. Penyebaraan kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini pada masa pandemi bagi responden, sehingga hal ini sedikit menghambat dalam proses pengisian dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini.

5.4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di peroleh beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tetap melakukan penelitian serupa dan lebih menambahkan variabel terutama variabel personal dan sistem terhadap itu sendiri dan juga mendalami penelitian ini secara kualitatif.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak melakukan penyebaran kuesioner pada masa pandemi bagi responden.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) "Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis"* (1st ed.). Yogyakarta: Andi

Alfiyah, N., & Sri, W. L. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan,* 7 (2): 1081-1090

Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (1): 1 -15

Arifin, Andika Hamam. (2019). pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten magelang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* 1 (10): 5-15

Arikunto, S . (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis,* 14 (1): 62-71

Buletin APPBN. (2018). *Pentingnya Faktor Pendukung Insentif Pajak Sebagai Upaya Tarik Minat Investor*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI: Jakarta

Danarsi. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* 18 (01): 45-55

Direktorat Jendral Pajak (DJP). (2013). *Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. Surat Edaran*. Jakarta Indonesia: Direktorat Jendral Pajak

Fahmi, H. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). *Jurnal Ekonomi,* 2 (1): 20-26

Fitriandi, P. (2020). Pemajakan atas Transaksi Melalui Online Marketplace. Jurnal *Pajak Indonesia,* 4 (3): 14-20

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18 (1): 39–50

Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M. (2000) . *Structural Equation Modeling and Regression: Guidelines for Research Practice*. Communications of the Association for Information Systems 4 pp-pp: Lawrence Erlbaum Associates

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hair, J. F. J., William, C. B., Barry, J. B., & Ralph, E. A. (2014). *Multivariate Data Analysis*. London: Pearson Education Limited

Hani, A.R. & Fajar, O. (2017). Pengaruh Lingkungan Etika Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing* dengan *Locus of Control* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 03 (1): 330–340

Hardiningsih, P. & Yulianawati. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3 (1): 126 – 142

Hardiningsih, P. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2 (1): 126 – 142

Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley

Kanning, U. P., & Hill, A. (2013). Validation of the Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) in Six Languages. *Journal of Business and Media Psychology*, 4(2): 1–12

KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari http://kbbi.web.id/ . (Diakses 3 Desember 2020)

Kelley, H. (1972). Attribution Theory in Social Psychology. *Nebraska Symposium on Motivation*, 1(5): 192-238

Kogler, C., Jerome, O., & Rebecca, I. B. (2020). Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization Tilburg University Netherlands*: 390-398

Lestari, R., & Yaya .R. (2017). Whistleblowing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Melaksanakannya oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*, 03 (17): 336–350

Lestari, S. P. (2020). Online Shop yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, 9 (5): 20-27

Luzuriaga, A. L., & Carlos, S. (2019). Compliance Spillovers Across Taxes: The Role of Penalties and Detection. *Journal of Economic Behavior and Organization George Washington University and Inter-American Development Bank*, United States: 400-412

Mar'linah, L. (2020). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Universitas Bina Sarana Informatika*, 4 (2): 2-8

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi terbaru 2018.* Yogyakarta: Andi

Muliari, N. K., & Putu, E. S. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*, 2 (19): 1-23

Notohatmodjo, B. S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji*, 1 (1): 17-23

Nugroho, R. A. & Zulaikha. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2): 1-11

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Prabowo, F. D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2): 11-18

Pradiani, T. (2017). Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11 (2): 15-23

Prasetya, J., & Gayatri. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dengan Pengugkapan Corporate Sosial Resposibility Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,* 14 (1): 511-538

Pratama, M. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Keuangan Publik,* 3 (3): 100-110

Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rachmawati, A. (2019). Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tarakan. *Jurnal Perpajakan Universitas Kristen Petra,* 2 (1): 20-29

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi,* 1 (1): 24-30

Republik Indonesia .(2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

_____ .(2008). *Undang-Undang No.36 Tahun 2008. tentang Pajak Penghasilan*

_____ . (2009). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

_____ .(2009). *Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

_____ .(2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tentang Pajak Penghasilan Final*

_____ .(2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013. Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce*

_____ .(2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu*

_____ .(2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Rosdiana, H., & Edi. S. I. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

Rumiyatun & Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Universitas Bina Sarana Informatika*. 4 (2): 2-8

Putri, N. R. & Wiwit. I. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Effective Tax Rate Terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Kajian Akuntansi.* 3 (1): 93-108

Sakti, N. W. (2014). *Buku Pintar Pajak Ecommerce (dari Mendaftar Sampai Membayar).* Jakarta: Visimedia

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT Refika Adimata

Sari, R. P. (2018). *Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* 7 (6) : 63-67

Siregar, S. (2016). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian : Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers

Solihin & Ratmono. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Andi

Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subarkah, J & Maya, W. D. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17 (02): 61- 73

Suhendri, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (4): 6-12

Sumarsan, T. (2016). *Perpajakan Indonesia Volume 4*. Jakarta: PT. Indeks

Suryadi. (2019). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik,* 4 (1): 105-121

Suyanto, M. (2007). *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan edisi 1*. Yogyakarta: Andi

Tulenan, A., & Sondakh. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi FEB*, 20 (17): 296-303

Weiber, R. & Daniel, M. (2014). Strukturgleichungs-modellierung. *Eine Enwendungsorientierte Einführung in die Kausalanalyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS*. Zweite: Erweiterte und Korrigierte Auflage

Wiyono, G. (2011). *Merancang penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 dan SmartPLS 2.0,* edisi I cetakan I. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Generasi Baru Mengelola Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan VisualPLS.* Jakarta: Salemba Infotek

Yasa, I. N. P. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi,* 5 (1): 106-129

Yuhertiana. (2016). Etika, Organisasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi,*7 (1) : 1-155

Zhang, L., Eric, S., & Andrea, G. (2020). The Effects of Individual Values on Willingness to Pay and Fairness Perceptions of Use Tax on Internet Purchases. *Journal Advances in Taxation Emerald Publishing Limited 27*: 197–221

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian

Kuesioner Mengenai Kepatuhan Pajak

Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak transaksi online UMKM di provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung, saya sangat menghargai dan berterima kasih, jika anda dapat meluangkan waktu sekitar sepuluh menit untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi anda sangat berharga untuk membantu saya untuk menyelesaikan studi.

Kuesioner ini tanpa identitas dan sifatnya sukarela. Partisipan mempunyai kebebasan untuk membatalkan kapan saja, tanpa konsekuensi. Semua jawaban anda hanya akan digunakan untuk penelitian akademik dan aksesnya terbatas bagi peneliti dan supervisor. Silahkan memilih jawaban yang paling sesui dengan kondisi anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi di 081226554575 (email:alexolasmono@gmail.com atau 19919010@students.uii.ac.id)

Hormat Saya



Eko Lasmono
Kandidat Master
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Kuesioner Mengenai Kepatuhan Pajak

Dalam studi ini, kepatuhan pajak didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tujuan utama dari kuesioner adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM di provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung.

Kuesioner ini terdiri dari 6 (enam) bagian, bagian pertama berisi tentang informasi demografi. Sedangkan 5 bagian kedua sampai keenam berisi aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM.

Untuk bagian pertama di bawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda cek (√) untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda pada (❑) atau dengan mengisi tempat yang telah tersedia.

Bagian 1: Informasi Demografi

1. Jenis Kelamin : ❑ Pria ❑ Wanita
2. Kelompok Usia :

❑ < 20 tahun ❑ 40 - 49 tahun
❑ 20 - 29 tahun ❑ 50 - 59 tahun
❑ 30 - 39 tahun ❑ 60 > tahun

3. Apakah Pendidikan Terakhir Anda ?

❑ SD ❑ SMA atau yang sederajat
❑ SMP atau yang sederajat ❑ Perguruan Tinggi

4. Apa Jenis Usaha Anda ?

❑ Usaha Kuliner ❑ Usaha Otomotif
❑ Usaha Dagang ❑ Usaha Jasa
❑ Usaha Industri ❑ Usaha lain - lain

5. Berapa Usia Usaha Anda ?

❑ < 5 Tahun ❑ 10 – 14 Tahun

❑ 6 - 9 Tahun ❑ >15 Tahun

6. Pendapatan Usaha Anda per bulan ?

❑ < Rp.5.000.000,-

❑ Rp 5.000.001 s/d Rp. 10.000.000,-

❑ Rp. 10.000.001 s/d Rp. 20.000.000,-

❑ Rp. 20.000.001 s/d Rp. 35.000.000,-

❑ > Rp. 35.000.000,-

7. Usaha Anda berada di daerah ?

☐ Yogyakarta

☐ Jawa Tengah

☐ Lampung

Silahkan jawab pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda cek (√) pada tempat yang tersedia (❑) untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab bagian 2 - 6 silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju. 2. Tidak Setuju. 3. Agak Tidak Setuju. 4. Agak Setuju. 5. Setuju. 6. Sangat Setuju.

Sejauhmana anda setuju atas pernyataan-pernyataan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

Dalam merespon pernyataan dibawah ini, silakan merujuk pada keadaan yang paling sering anda temui pada saat anda melakukan usaha.

Bagian 2: Kebijakan Pajak (X1)

Kebijakan Pajak	**Kode : KP**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Kebijakan pajak yang baik memberikan kesempatan kepada Anda yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	❑	❑	❑	❑	❑	❑
2.	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda mendapatkan NPWP	❑	❑	❑	❑	❑	❑
3.	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda melakukan kewajiban perpajakan transaksi online UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
4.	Kebijakan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak transaksi online UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
5.	Kebijakan pajak menjadi dasar wajib pajak membayar pajak transaksi online UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
6.	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda membayar pajak transaksi online UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
7.	Kebijakan pajak yang baik akan mempermudah Anda mepertahankan usaha transaksi online UMKM di masa pandemi	❑	❑	❑	❑	❑	❑

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju.	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Sejauhmana anda setuju atas pernyataan-pernyataan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

Dalam merespon pernyataan dibawah ini, silakan merujuk pada keadaan yang paling sering anda temui pada saat anda melakukan usaha.

Bagian 3 : Pengetahuan Pajak (X2)

Pengetahuan Pajak	**Kode : PP**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Setiap orang yang memiliki usaha dan berpenghasilan harus memiliki NPWP	❑	❑	❑	❑	❑	❑
2.	Kepemilikan NPWP adalah indentitas bagi wajib pajak	❑	❑	❑	❑	❑	❑
3.	Kepemilikan NPWP adalah sarana untuk pengadministrasian pajak	❑	❑	❑	❑	❑	❑
4.	Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP maka wajib melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan	❑	❑	❑	❑	❑	❑
5.	Wajib pajak yang sudah ber NPWP mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajak secara berkala	❑	❑	❑	❑	❑	❑
6.	Wajib pajak yang terlambat membayar dan melaporkan pajak akan diberikan peringatan	❑	❑	❑	❑	❑	❑
7.	Wajib pajak yang terlambat membayar dan melaporkan pajak akan diberikan sanksi	❑	❑	❑	❑	❑	❑
8.	Besarnya pajak akan dikenakan kepada wajib pajak yang telah memiliki penghasilan sesuai ketentuan undang – undang	❑	❑	❑	❑	❑	❑
9.	Fungsi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara	❑	❑	❑	❑	❑	❑

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju.	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Sejauhmana anda setuju atas pernyataan-pernyataan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

Dalam merespon pernyataan dibawah ini, silakan merujuk pada keadaan yang paling sering anda temui pada saat anda melakukan usaha.

Bagian 4 : Sanksi Pajak (X3)

Sanksi Pajak	**Kode : SP**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Sanksi pajak diberikan atas pelanggaran pajak yang di lakukan	❑	❑	❑	❑	❑	❑
2.	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak	❑	❑	❑	❑	❑	❑
3.	Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	❑	❑	❑	❑	❑	❑
4.	Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak	❑	❑	❑	❑	❑	❑
5.	Pengenaan sanksi pajak berdasarkan ketentuan undang – undang	❑	❑	❑	❑	❑	❑
6.	Pengenaan sanksi dilaksanakan kepada Wajib pajak yang melakukan pelanggaran	❑	❑	❑	❑	❑	❑
7.	Pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.	❑	❑	❑	❑	❑	❑

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju.	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Sejauhmana anda setuju atas pernyataan-pernyataan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

Dalam merespon pernyataan dibawah ini, silakan merujuk pada keadaan yang paling sering anda temui pada saat anda melakukan usaha.

Bagian 5 : Kepatuhan Pajak (Y)

Kepatuhan Pajak	**Kode : KP**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan dan keinginan sendiri	❑	❑	❑	❑	❑	❑
2.	Saya selalu mengisi SPT(Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perpajakan	❑	❑	❑	❑	❑	❑
3.	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu	❑	❑	❑	❑	❑	❑
4.	Saya selalu membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri	❑	❑	❑	❑	❑	❑
5.	Saya selalu melaporkan pendapatan sesuai dengan kondisi yang ada	❑	❑	❑	❑	❑	❑
6.	Saya berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan kewajiban bagi warga negara	❑	❑	❑	❑	❑	❑
7.	Saya berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik	❑	❑	❑	❑	❑	❑

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju.	Tidak Setuju.	Agak Tidak Setuju.	Agak Setuju.	Setuju.	Sangat Setuju.

Sejauhmana anda setuju atas pernyataan-pernyataan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

Dalam merespon pernyataan dibawah ini, silakan merujuk pada keadaan yang paling sering anda temui pada saat anda melakukan usaha.

Bagian 6 : Insentif Pajak (Z)

Insentif Pajak	**Kode : IP**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Sebagai wajib pajak, Anda dapat memanfaatkan Insentif pajak transaksi online usaha UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
2.	Insentif pajak dapat berupa pengurangan atau pembebasan beban pajak transaksi online usaha UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
3.	Insentif pajak dapat mengurangi beban pajak transaksi online usaha UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
4.	Insentif pajak akan meringankan wajib pajak melakukan kewajiban pajak transaksi online usaha UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
5.	Insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan transaksi online usaha UMKM	❑	❑	❑	❑	❑	❑
6.	Insentif pajak dari pemerintah dapat membantu usaha transaksi online UMKM bertahan di masa pandemi	❑	❑	❑	❑	❑	❑

LAMPIRAN II TABEL INDUK KUESIONER

Variabel	Kebijakan Pajak (X1)								Pengetahuan Pajak (X2)										Sanksi Pajak (X3)								Kepatuhan Pajak (Y)								Insentif Pajak (Z)						
Responden	Question item							Total Skor	Question item									Total Skor	Question item							Total Skor	Question item							Total Skor	Question item						Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	5	5	5	47	6	6	6	5	5	5	5	38	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	6	5	38	5	5	6	6	6	5	33
3	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	5	6	5	5	5	5	46	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	6	6	5	5	37	6	5	5	5	6	6	5	5	5	48	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	6	5	5	5	5	38	5	5	5	5	6	5	31
5	5	6	5	6	5	5	6	38	6	5	6	6	6	5	5	6	6	51	5	5	6	6	5	6	6	39	5	6	5	6	6	5	5	38	5	6	5	5	5	5	31
6	6	6	6	5	5	6	5	39	5	5	5	6	5	6	6	6	5	49	6	6	5	6	5	6	6	40	5	5	6	5	5	5	5	36	5	6	5	5	5	5	31
7	5	5	5	6	6	6	5	38	6	6	5	5	5	6	6	5	5	49	5	5	6	6	5	6	6	39	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	6	32
8	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	5	6	6	5	5	5	5	47	5	5	5	6	5	5	6	37	5	5	5	6	6	5	6	38	5	5	6	5	5	5	31
9	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	6	6	5	5	5	37	6	5	5	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	32
10	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	5	5	6	6	6	5	5	50	5	5	5	5	5	6	5	36	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	6	6	32
11	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	5	6	5	6	6	5	49	5	5	5	6	6	6	5	38	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	5	5	5	5	32
12	5	5	5	5	5	6	5	36	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	6	5	38	5	5	6	5	5	5	31
13	5	5	6	5	5	6	6	38	6	6	6	5	5	5	5	6	6	50	6	6	6	5	5	5	5	38	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	6	5	5	6	34
14	5	5	5	6	6	6	6	39	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	6	5	38	5	5	5	5	6	5	31
15	5	5	5	6	6	5	5	37	6	5	6	5	5	6	6	6	5	50	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	6	6	39	5	5	5	6	6	5	32
16	5	5	5	5	5	5	6	36	5	5	5	5	6	6	6	5	5	48	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	6	6	6	5	33
17	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	6	5	5	48	6	6	6	5	5	5	5	38	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	6	5	33
18	5	5	5	6	5	6	6	38	5	5	5	5	6	6	5	5	5	47	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	5	5	30
19	5	5	5	5	5	5	5	35	6	5	6	5	6	6	6	6	6	52	5	6	6	5	5	5	6	38	5	6	6	6	6	5	5	39	5	6	5	5	5	6	32
20	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	6	6	6	33
21	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	5	5	5	5	5	5	5	47	5	5	5	5	5	6	6	37	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	5	32
22	6	6	6	5	6	6	6	41	6	5	6	6	6	6	6	6	6	53	5	5	6	6	6	5	6	39	5	6	6	6	6	6	6	41	5	5	5	6	6	6	33
23	6	5	6	5	5	6	6	39	6	6	6	5	5	5	6	6	5	50	6	5	6	5	5	6	6	39	5	6	6	5	5	6	5	38	5	5	6	6	5	5	32
24	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	5	5	6	6	6	6	49	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	6	6	39	6	6	6	5	5	6	34
25	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	6	5	5	5	5	6	6	48	5	5	5	5	5	6	5	36	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	6	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	6	6	37	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	32
27	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	6	6	6	6	6	6	6	42	6	6	6	6	6	6	6	42	6	6	6	6	6	6	36
28	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	5	5	5	5	5	6	6	49	6	6	5	6	5	5	6	39	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	6	32
29	6	5	6	5	5	6	5	38	6	6	5	5	5	5	6	6	5	49	5	5	5	6	6	5	6	38	5	6	6	5	5	6	5	38	5	5	5	5	6	6	32
30	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	5	6	6	6	6	5	5	49	5	5	6	5	5	6	6	38	5	5	6	5	6	6	5	38	5	5	5	6	6	5	32
31	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	5	5	5	5	47	5	5	6	5	6	5	5	37	5	5	5	5	5	6	5	36	5	6	6	5	5	5	32
32	5	5	5	6	5	5	5	36	5	6	5	6	5	5	5	5	6	48	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	6	5	38	6	5	5	5	6	5	32
33	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	6	6	6	5	5	48	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	5	5	5	30
34	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	5	5	5	6	6	6	38	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	32
35	5	5	5	6	6	6	5	38	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	5	5	5	5	5	6	6	37	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	6	5	32

LAMPIRAN II TABEL INDUK KUESIONER

Variabel	Kebijakan Pajak (X1)								Pengetahuan Pajak (X2)										Sanksi Pajak (X3)								Kepatuhan Pajak (Y)								Insentif Pajak (Z)						
Responden	Question item							Total Skor	Question item									Total Skor	Question item							Total Skor	Question item							Total Skor	Question item						Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	
36	5	5	5	6	5	6	6	**38**	6	6	6	5	5	5	5	5	5	**48**	6	6	5	5	5	6	5	**38**	5	5	5	5	5	6	6	**37**	5	5	6	6	6	6	**34**
37	5	5	5	5	6	6	5	**37**	6	5	5	5	6	6	5	5	5	**48**	5	5	6	6	5	5	6	**38**	6	6	6	5	5	6	5	**39**	6	6	6	5	5	5	**33**
38	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	5	5	6	**48**	5	5	6	6	6	6	5	**39**	5	5	5	6	6	6	5	**38**	5	5	6	6	6	5	**33**
39	5	5	5	6	6	5	6	**38**	5	5	5	6	6	5	5	5	5	**47**	5	5	5	5	6	5	5	**36**	6	6	6	5	5	5	5	**38**	6	6	5	5	5	5	**32**
40	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	6	6	6	5	6	5	5	**49**	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	5	5	6	6	6	**38**	5	5	5	6	6	5	**32**
41	5	5	6	6	6	5	5	**38**	6	5	6	6	6	6	5	5	6	**51**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	6	6	5	5	6	**38**	5	5	5	6	6	5	**32**
42	5	5	5	5	5	6	5	**36**	5	5	5	5	5	5	6	6	6	**48**	6	6	5	5	5	5	6	**38**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	5	6	6	**32**
43	6	6	6	6	6	6	6	**42**	5	5	5	6	6	6	5	5	5	**48**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	5	6	5	**31**
44	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	5	5	6	5	6	5	5	5	**47**	5	5	5	5	6	5	5	**36**	5	6	6	5	5	5	5	**37**	5	5	5	5	6	5	**31**
45	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	6	5	5	6	5	5	5	**47**	5	5	5	6	5	5	5	**36**	5	6	6	5	6	5	5	**38**	5	6	5	5	5	5	**31**
46	5	5	5	6	5	6	5	**37**	5	5	6	6	5	5	6	5	5	**48**	5	5	5	6	5	5	6	**37**	5	5	5	6	6	6	5	**38**	5	5	6	5	5	5	**31**
47	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	6	5	6	5	5	6	5	**48**	5	5	5	6	5	5	5	**36**	5	6	5	5	6	5	5	**37**	5	5	6	5	6	6	**33**
48	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	6	5	6	5	5	6	5	**48**	5	5	6	6	5	6	5	**38**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	6	5	5	5	**31**
49	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	5	6	6	5	5	6	**48**	6	5	5	5	6	5	5	**37**	6	5	5	5	5	6	5	**37**	6	5	5	5	6	5	**32**
50	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	5	5	5	**47**	6	5	5	5	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	6	5	5	**31**
51	5	5	5	6	6	5	5	**37**	6	6	6	5	5	5	5	6	5	**49**	5	5	6	6	6	5	5	**38**	5	5	5	6	6	5	6	**38**	6	5	5	6	6	5	**33**
52	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	6	6	6	5	5	5	6	**49**	5	5	5	6	6	6	5	**38**	6	6	6	5	5	5	6	**39**	6	6	6	5	6	5	**34**
53	5	5	5	6	6	5	5	**37**	6	6	5	5	5	5	6	6	6	**50**	5	5	5	6	6	6	5	**38**	5	5	5	6	5	5	5	**36**	5	6	6	5	5	5	**32**
54	5	5	5	5	6	6	6	**38**	6	6	5	5	5	5	6	6	5	**49**	6	5	5	6	6	5	5	**38**	5	5	5	6	6	6	5	**38**	6	6	6	5	6	6	**35**
55	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	6	6	5	5	5	5	6	5	**48**	6	6	5	5	5	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	6	**38**	5	5	5	6	6	5	**32**
56	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	5	5	5	**47**	5	5	6	6	5	5	6	**38**	5	5	5	5	6	5	5	**36**	5	5	5	6	5	5	**31**
57	5	6	6	5	5	6	6	**39**	6	6	5	5	5	6	6	5	5	**49**	6	6	5	5	5	6	5	**38**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	6	5	5	5	**31**
58	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	5	5	5	**47**	5	5	5	6	5	6	5	**37**	5	5	6	5	5	5	5	**36**	5	5	6	6	6	5	**33**
59	5	5	5	6	6	6	6	**39**	5	5	5	5	6	6	6	5	6	**49**	6	6	6	5	5	5	5	**38**	6	6	5	5	5	5	6	**38**	5	5	5	6	6	6	**33**
60	5	5	5	6	6	6	5	**38**	6	6	6	5	5	5	5	6	6	**50**	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	6	6	5	6	**33**
61	5	5	5	6	6	5	5	**37**	6	6	5	5	5	6	6	5	5	**49**	6	6	6	5	5	5	6	**39**	5	5	5	6	6	5	6	**38**	6	6	6	5	5	5	**33**
62	5	5	6	5	5	5	5	**36**	5	5	5	6	5	5	5	5	5	**46**	5	5	6	5	5	5	5	**36**	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	5	5	6	5	5	**31**
63	6	6	6	5	5	5	5	**38**	6	6	6	5	5	6	6	6	5	**51**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	6	6	6	5	5	6	5	**39**	5	5	5	6	6	5	**32**
64	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	6	6	5	5	5	5	5	5	**47**	5	6	5	6	5	5	5	**37**	5	5	5	6	5	5	5	**36**	5	5	5	6	6	5	**32**
65	6	6	5	6	5	6	6	**40**	6	6	6	5	5	6	6	6	6	**52**	6	6	5	5	6	6	6	**40**	6	5	6	6	5	5	5	**38**	5	5	5	5	5	5	**30**
66	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	6	6	5	5	6	5	5	5	**48**	6	6	5	5	5	5	5	**37**	5	5	6	6	5	5	6	**38**	5	5	6	5	6	5	**32**
67	5	5	5	6	5	5	5	**36**	5	5	6	6	6	5	5	5	5	**48**	6	6	5	5	5	5	5	**37**	5	5	6	5	6	5	5	**37**	5	5	5	6	5	5	**31**
68	5	5	6	5	6	5	5	**37**	5	5	6	5	5	5	5	5	5	**46**	5	5	6	6	5	5	5	**37**	5	6	5	5	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	5	**32**
69	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	6	5	5	5	6	5	5	5	**47**	5	5	6	5	5	5	5	**36**	5	5	5	5	6	6	5	**37**	5	5	5	6	5	5	**31**
70	6	6	6	5	5	6	6	**40**	6	6	6	6	5	5	6	6	6	**52**	5	5	5	6	6	5	5	**37**	5	5	5	6	6	6	5	**38**	5	5	6	6	6	5	**33**

LAMPIRAN II TABEL INDUK KUESIONER

Variabel	Kebijakan Pajak (X1)								Pengetahuan Pajak (X2)										Sanksi Pajak (X3)								Kepatuhan Pajak (Y)								Insentif Pajak (Z)						
Responden	Question item							Total Skor	Question item									Total Skor	Question item							Total Skor	Question item							Total Skor	Question item						Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	
71	5	5	5	5	6	6	6	38	5	5	6	5	6	5	5	5	5	47	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	6	6	6	5	5	38	5	6	5	5	5	5	31
72	6	6	6	6	6	6	6	42	6	6	5	5	6	6	6	6	5	51	5	5	5	6	6	6	5	38	6	6	5	5	5	5	6	38	5	5	5	6	6	5	32
73	6	6	5	6	6	6	6	41	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	5	6	6	6	6	39	6	6	5	5	6	5	5	38	6	6	6	5	5	5	33
74	6	5	5	5	5	5	5	36	5	5	5	6	5	5	6	5	5	47	5	5	5	5	5	5	6	36	6	5	5	5	5	5	5	36	6	5	5	5	6	6	33
75	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	5	5	5	5	5	46	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	5	5	5	6	37	5	5	6	5	5	5	31
76	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	6	6	5	5	6	6	49	5	5	5	6	6	6	5	38	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	5	6	32
77	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	5	5	6	6	6	49	5	5	5	5	6	6	5	37	5	6	5	5	5	5	6	37	5	6	5	5	6	5	32
78	5	5	6	5	5	5	5	36	5	5	6	5	6	5	5	5	5	47	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	6	38	5	6	5	5	5	5	31
79	6	5	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	5	6	6	5	5	48	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	5	6	37	5	5	5	6	5	5	31
80	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	5	6	5	5	6	6	5	48	5	5	5	6	5	5	5	36	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	31
81	5	5	6	5	5	5	5	36	5	5	6	5	5	5	5	6	5	47	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	6	6	5	5	32
82	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	5	6	5	5	5	5	47	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	32
83	5	5	5	5	6	5	6	37	5	5	6	5	6	5	5	6	5	48	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	5	5	5	5	36	5	5	5	6	6	6	33
84	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	31
85	5	5	6	6	5	5	6	38	5	6	5	5	5	5	6	5	5	47	6	6	5	5	5	6	6	39	5	5	6	5	5	6	6	38	5	5	6	6	5	5	32
86	5	6	5	6	5	5	5	37	5	6	6	5	5	5	5	5	5	47	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	5	5	5	5	6	38	5	5	6	5	5	5	31
87	5	5	6	6	5	5	5	37	5	6	5	6	5	5	6	5	5	48	5	5	6	5	5	5	6	37	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	6	5	5	5	31
88	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	5	5	47	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	5	5	32
89	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	5	6	5	6	5	5	5	47	5	6	6	5	5	5	5	37	5	6	6	5	5	5	5	37	6	6	6	6	6	6	36
90	5	5	5	6	6	5	6	38	6	6	6	5	5	5	6	6	5	50	6	6	5	5	6	6	5	39	5	5	5	6	6	5	6	38	6	5	5	6	5	6	33
91	5	5	5	6	6	6	5	38	5	5	6	6	5	5	5	6	5	48	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	6	6	5	5	32
92	6	6	5	5	6	6	6	40	6	6	5	6	5	5	5	5	6	49	6	5	5	5	5	6	6	38	5	6	6	5	5	5	5	37	6	5	5	6	5	6	33
93	5	5	6	6	5	5	5	37	5	6	6	5	6	5	5	6	6	50	5	6	5	5	6	5	5	37	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	6	5	5	5	31
94	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	6	6	5	5	49	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	5	6	5	6	34
95	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	6	5	5	6	5	5	5	47	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	6	5	5	5	5	36	5	6	6	5	5	5	32
96	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	5	6	5	47	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	5	5	5	36	5	6	6	5	5	5	32
97	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	5	6	5	6	5	5	5	47	5	6	5	5	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	6	38	5	5	5	6	5	5	31
98	5	6	5	5	5	5	6	37	5	6	6	5	5	5	5	5	5	47	5	5	6	5	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	5	5	5	31
99	5	5	6	5	6	6	6	39	6	6	6	5	6	5	5	5	5	49	6	6	5	5	5	5	6	38	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	5	31
100	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	6	5	5	6	49	5	5	6	6	6	6	5	39	5	5	6	5	5	6	5	37	6	6	5	5	6	5	33
101	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	5	6	6	5	5	48	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	6	6	6	5	33
102	6	6	6	6	5	5	5	39	5	5	6	6	5	5	6	6	5	49	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	6	6	6	5	38	6	6	6	6	6	6	36
103	5	5	5	6	6	5	5	37	5	6	6	5	5	5	6	5	5	48	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	31
104	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	5	6	6	5	5	5	37	6	5	5	5	6	6	5	38	5	5	6	5	5	6	32
105	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	6	5	5	5	5	6	6	50	5	5	5	5	6	6	5	37	6	5	5	5	5	6	5	37	5	5	5	5	6	6	32

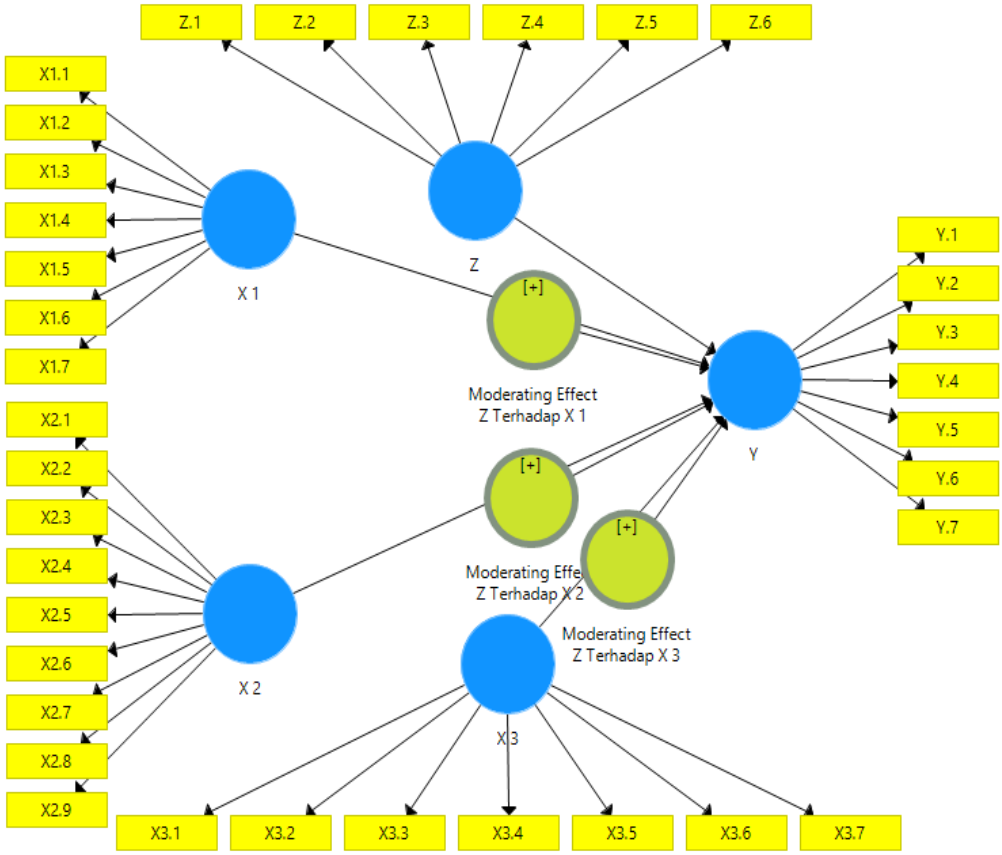
LAMPIRAN II TABEL INDUK KUESIONER

Variabel	Kebijakan Pajak (X1)								Pengetahuan Pajak (X2)										Sanksi Pajak (X3)								Kepatuhan Pajak (Y)								Insentif Pajak (Z)						
Responden	Question item							Total Skor	Question item									Total Skor	Question item							Total Skor	Question item							Total Skor	Question item						Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	
106	5	5	6	6	5	6	5	38	6	5	5	5	5	6	5	5	5	47	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	5	5	5	5	32
107	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	5	6	5	6	6	6	49	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	6	33
108	6	6	6	5	5	5	5	38	5	5	5	5	6	6	5	6	5	48	6	6	5	5	5	6	6	39	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	32
109	5	5	5	6	5	6	5	37	5	6	5	5	5	5	6	5	6	48	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	5	5	6	5	31
110	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	5	6	5	5	48	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	5	5	6	5	36	5	6	6	5	5	5	32
111	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	5	6	5	5	6	6	6	49	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	5	6	5	5	5	36	6	6	5	5	5	5	32
112	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	6	5	5	48	5	6	5	5	5	5	5	36	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	6	6	5	5	32
113	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	5	6	5	6	5	48	5	5	6	6	6	5	5	38	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	31
114	6	6	5	5	5	5	6	38	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	5	6	32
115	6	6	6	6	6	6	6	42	6	5	5	5	5	6	6	5	5	48	5	6	5	5	6	6	5	38	5	5	5	6	5	5	6	37	5	6	6	6	5	5	33
116	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	6	6	5	6	5	48	5	5	6	5	5	5	5	36	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	5	5	5	5	30
117	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	5	5	5	5	6	5	5	48	6	6	5	6	6	5	5	39	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	6	6	33
118	5	6	6	5	6	6	5	39	6	5	5	6	6	6	6	6	5	51	6	5	6	6	6	5	5	39	5	5	6	6	6	6	6	40	6	6	5	6	6	6	35
119	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	5	6	5	5	6	47	5	5	6	6	5	5	5	37	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	6	5	6	5	32
120	5	5	6	6	6	5	5	38	5	6	6	5	5	5	5	5	5	47	5	5	6	6	5	6	5	38	5	5	5	6	5	6	5	37	5	4	5	6	5	5	30
121	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	5	5	5	5	5	6	5	48	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	6	6	6	6	6	42	5	5	5	6	5	6	32
122	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	5	5	5	5	5	5	5	47	5	5	5	5	5	6	5	36	5	5	5	5	6	5	5	36	5	6	6	5	5	5	32
123	5	5	5	6	6	6	5	38	5	5	6	5	5	6	6	5	5	48	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	6	5	33
124	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	5	5	6	5	5	5	5	46	6	6	6	6	5	5	5	39	5	5	6	6	6	6	5	39	5	5	5	5	5	6	31
125	5	6	5	6	6	5	6	39	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	5	6	5	38	5	5	5	6	6	5	32
126	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	6	6	49	5	6	6	5	5	5	5	37	5	6	5	5	6	6	5	38	6	5	5	5	5	6	32
127	6	6	6	5	6	5	6	40	5	5	6	6	6	6	5	6	5	50	5	5	5	5	5	6	5	36	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	30
128	5	5	5	5	6	5	5	36	5	5	5	6	6	5	5	5	5	47	5	6	6	5	5	5	6	38	5	5	5	6	5	5	5	36	6	6	5	5	5	5	32
129	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	6	5	5	6	5	5	47	5	5	5	5	6	5	6	37	5	5	6	5	5	6	5	37	5	6	6	6	5	5	33
130	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	5	5	6	6	5	47	5	5	5	5	5	6	5	36	5	6	6	6	5	5	5	38	5	6	6	5	6	5	33
131	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	6	5	5	5	5	47	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	6	5	5	5	31
132	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	6	6	5	49	5	5	6	5	5	6	5	37	5	6	5	5	5	6	5	37	5	6	5	5	6	5	32
133	5	6	5	6	5	5	6	38	5	6	6	5	5	5	5	5	5	47	5	5	5	5	6	6	6	38	5	6	5	6	6	5	5	38	6	5	5	5	5	5	31
134	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	6	5	36	5	5	6	6	5	5	5	37	6	6	5	6	6	5	34
135	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	5	5	5	47	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	5	37	5	6	6	5	5	5	32

LAMPIRAN II TABEL INDUK KUESIONER

Variabel	Kebijakan Pajak (X1)								Pengetahuan Pajak (X2)										Sanksi Pajak (X3)								Kepatuhan Pajak (Y)								Insentif Pajak (Z)						
Responden	Question item							Total Skor	Question item									Total Skor	Question item							Total Skor	Question item							Total Skor	Question item						Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	
136	5	5	5	6	5	6	5	37	5	5	5	6	6	6	5	5	5	48	5	5	6	5	5	5	5	36	6	6	5	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	5	31
137	5	5	6	6	5	5	5	37	5	6	6	5	5	6	6	5	5	49	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	5	5	32
138	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	6	5	6	5	5	47	5	5	5	6	5	5	5	36	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	5	6	5	31
139	6	6	6	6	6	6	6	42	5	5	5	6	6	6	6	6	6	51	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	6	6	6	6	34
140	5	5	5	6	6	5	6	38	5	5	5	6	6	5	6	6	5	49	5	5	5	5	6	5	5	36	6	5	5	6	6	5	5	38	5	6	5	5	5	6	32
141	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	5	6	5	6	6	5	5	48	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	6	6	5	5	6	38	5	6	5	5	6	5	32
142	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	5	6	5	6	6	5	49	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	6	6	5	6	5	38	5	6	6	5	5	5	32
143	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	5	6	5	5	5	5	36	5	5	5	6	6	6	5	38	6	6	5	5	5	5	32
144	5	6	5	5	5	5	6	37	6	6	6	6	5	6	6	6	6	53	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35	6	5	5	5	5	5	31
145	5	6	5	6	6	6	6	40	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	6	6	6	6	6	6	6	42	6	6	6	6	6	6	6	42	6	6	6	6	6	6	36
146	5	6	5	5	5	6	6	38	5	5	6	6	5	5	5	6	6	49	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	6	31
147	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	6	5	6	5	5	6	5	48	5	5	6	6	5	6	5	38	6	5	6	5	5	6	5	38	5	5	5	6	5	5	31
148	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	5	5	6	5	5	5	5	46	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	5	5	6	5	6	37	6	6	5	5	5	5	32
149	5	5	5	6	6	5	5	37	6	6	6	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	5	5	31
150	5	5	6	6	5	6	5	38	5	5	6	6	5	5	6	5	5	48	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	6	37	6	5	5	5	6	5	32
151	5	5	5	5	6	6	6	38	5	5	6	6	6	5	5	5	5	48	5	6	5	6	5	5	5	37	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	5	5	31
152	5	5	6	5	5	6	5	37	6	5	5	5	6	6	5	5	5	48	5	5	5	6	5	5	5	36	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	5	5	5	30
153	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	5	6	5	5	5	6	5	47	5	5	5	5	6	6	5	37	6	6	5	5	5	5	6	38	5	5	5	5	5	6	31
154	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	6	5	5	6	5	48	5	5	6	6	5	6	5	38	5	6	5	5	5	6	5	37	5	5	5	6	6	5	32
155	5	5	5	6	6	5	5	37	5	5	6	5	6	6	5	5	5	48	5	5	6	5	5	6	5	37	5	5	5	5	6	6	5	37	5	5	6	6	5	5	32
156	5	6	6	5	6	6	5	39	5	5	5	6	6	5	6	5	5	48	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	5	5	6	37	5	5	6	6	6	5	33
157	5	5	6	6	5	5	5	37	5	5	5	6	6	5	6	5	5	48	5	6	6	5	5	5	5	37	5	6	6	5	5	5	5	37	5	5	6	5	5	5	31
158	5	5	6	6	6	5	5	38	5	5	5	6	5	5	5	6	5	47	6	5	5	5	5	6	5	37	6	5	5	5	6	5	5	37	5	5	6	6	5	5	32
159	5	6	6	5	5	5	5	37	5	6	5	6	5	5	5	6	5	48	5	5	6	5	6	6	5	38	5	5	6	5	6	5	5	37	5	5	6	5	5	5	31

Lampiran III Hasil Olah Data



Model Penelitian

	X 1	X 2	X 3	Y	Z
X1.1	0,926	0,800	0,810	0,830	0,865
X1.2	0,928	0,720	0,892	0,819	0,818
X1.3	0,995	0,711	0,790	0,752	0,720
X1.4	0,899	0,815	0,886	0,871	0,891
X1.5	0,890	0,790	0,800	0,870	0,810
X1.6	0,907	0,810	0,890	0,883	0,832
X1.7	0,899	0,743	0,781	0,773	0,742
X2.1	0,818	0,878	0,808	0,802	0,702
X2.2	0,780	0,909	0,842	0,803	0,800
X2.3	0,801	0,914	0,817	0,815	0,809
X2.4	0,767	0,906	0,750	0,761	0,703
X2.5	0,832	0,887	0,871	0,861	0,870
X2.6	0,801	0,851	0,730	0,841	0,738
X2.7	0,809	0,919	0,854	0,813	0,816
X2.8	0,802	0,869	0,778	0,807	0,742
X2.9	0,814	0,878	0,819	0,815	0,823
X3.1	0,799	0,715	0,895	0,756	0,732
X3.2	0,818	0,692	0,896	0,870	0,890
X3.3	0,468	0,428	0,912	0,467	0,406
X3.4	0,696	0,802	0,894	0,816	0,830
X3.5	0,708	0,747	0,901	0,773	0,763
X3.6	0,734	0,770	0,893	0,818	0,801
X3.7	-0,033	-0,024	-0,008	-0,015	0,012
Y.1	0,780	0,830	0,719	0,890	0,731
Y.2	0,785	0,713	0,748	0,895	0,766
Y.3	0,811	0,784	0,785	0,892	0,752
Y.4	0,806	0,816	0,860	0,893	0,882
Y.5	0,799	0,715	0,795	0,956	0,732
Y.6	0,834	0,788	0,780	0,972	0,790
Y.7	0,374	0,344	0,397	0,420	0,340
Z.1	0,798	0,807	0,790	0,789	0,935
Z.2	0,789	0,731	0,779	0,761	0,965
Z.3	0,738	0,778	0,786	0,752	0,902
Z.4	0,002	0,002	0,000	0,025	0,020
Z.5	-0,022	-0,006	-0,016	-0,008	-0,010
Z.6	0,038	0,009	0,053	0,016	0,042

Hasil Uji Validitas Diskriminan Awal

	X 1	X 2	X 3	Y	Z
X1.1	0,925	0,790	0,811	0,831	0,861
X1.2	0,918	0,740	0,812	0,829	0,838
X1.3	0,993	0,712	0,791	0,752	0,730
X1.4	0,898	0,816	0,882	0,872	0,891
X1.5	0,892	0,790	0,801	0,870	0,810
X1.6	0,905	0,810	0,890	0,883	0,832
X1.7	0,895	0,746	0,784	0,772	0,741
X2.1	0,819	0,877	0,807	0,802	0,701
X2.2	0,783	0,919	0,845	0,806	0,809
X2.3	0,801	0,914	0,817	0,815	0,809
X2.4	0,767	0,906	0,750	0,761	0,707
X2.5	0,842	0,887	0,861	0,871	0,875
X2.6	0,801	0,852	0,732	0,843	0,733
X2.7	0,808	0,919	0,854	0,814	0,818
X2.8	0,808	0,879	0,778	0,807	0,746
X2.9	0,815	0,877	0,819	0,815	0,823
X3.1	0,798	0,715	0,891	0,758	0,731
X3.2	0,817	0,695	0,897	0,870	0,891
X3.3	0,468	0,427	0,912	0,466	0,406
X3.4	0,694	0,803	0,891	0,817	0,831
X3.5	0,707	0,748	0,901	0,777	0,768
X3.6	0,735	0,771	0,896	0,819	0,802
Y.1	0,781	0,830	0,719	0,891	0,733
Y.2	0,785	0,723	0,758	0,894	0,764
Y.3	0,812	0,784	0,795	0,898	0,752
Y.4	0,806	0,816	0,860	0,891	0,882
Y.5	0,798	0,717	0,794	0,956	0,732
Y.6	0,836	0,789	0,780	0,977	0,791
Z.1	0,798	0,807	0,790	0,789	0,934
Z.2	0,789	0,731	0,779	0,761	0,965
Z.3	0,738	0,778	0,786	0,752	0,901

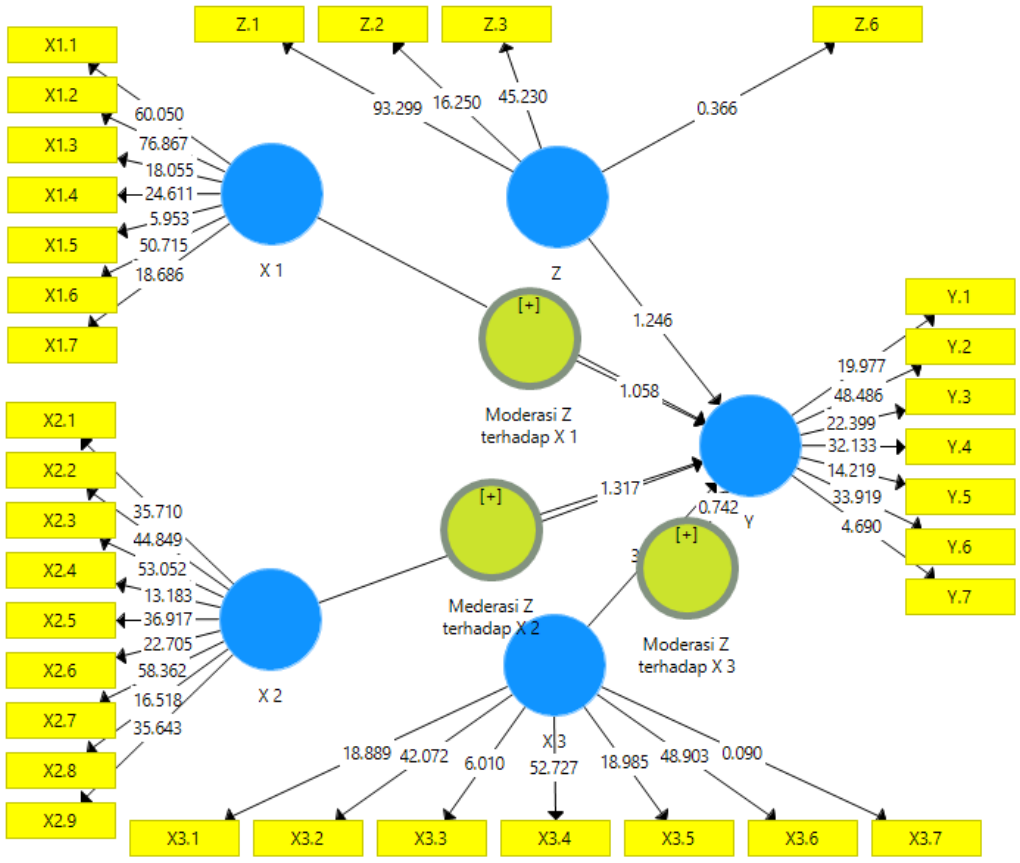
Hasil Uji Validitas Diskriminan Akhir

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X 1	0,919	0,939	0,937	0,686
X 2	0,956	0,957	0,963	0,742
X 3	0,824	0,910	0,880	0,557
Y	0,895	0,921	0,920	0,630
Z	0,663	0,847	0,802	0,569

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

	X 1	X 2	X 3	Y	Z
X 1	0,998				
X 2	0,976	0,982			
X 3	0,875	0,873	0,947		
Y	0,872	0,770	0,740	0,894	
Z	0,771	0,667	0,730	0,760	0,816

Korelasi Antar Variabel



Output Calculate Bootstrapping

	R Square	Adjusted R Square
Y	0,982	0,982

R Square Tanpa Moderasi

	R Square	Adjusted R Square
Y	0,983	0,982

R Square dengan Moderasi

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (| O/STDEV |)	P Values
X 1 -> Y	-0,045	-0,030	0,106	0,424	**0,672**
X 2 -> Y	0,772	0,745	0,137	5,630	**0,000**
X 3 -> Y	0,270	0,283	0,105	2,574	**0,010**

Pengujian *Inner* Model

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (| O/STDEV |)	P Values
Mederasi Z terhadap X 2 -> Y	-0,138	-0,124	0,109	1,263	**0,207**
Moderasi Z terhadap X 1 -> Y	0,085	0,079	0,085	1,003	**0,316**
Moderasi Z terhadap X 3 -> Y	0,065	0,057	0,092	0,709	**0,479**
X 1 -> Y	0,050	0,054	0,086	0,578	**0,564**
X 2 -> Y	0,667	0,656	0,166	4,025	**0,000**
X 3 -> Y	0,464	0,455	0,121	3,829	**0,000**
Z -> Y	-0,182	-0,166	0,145	1,252	**0,211**

Pengujian *Inner* Models Dengan Moderasi